

repository.ub.ac.id

# **Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik**

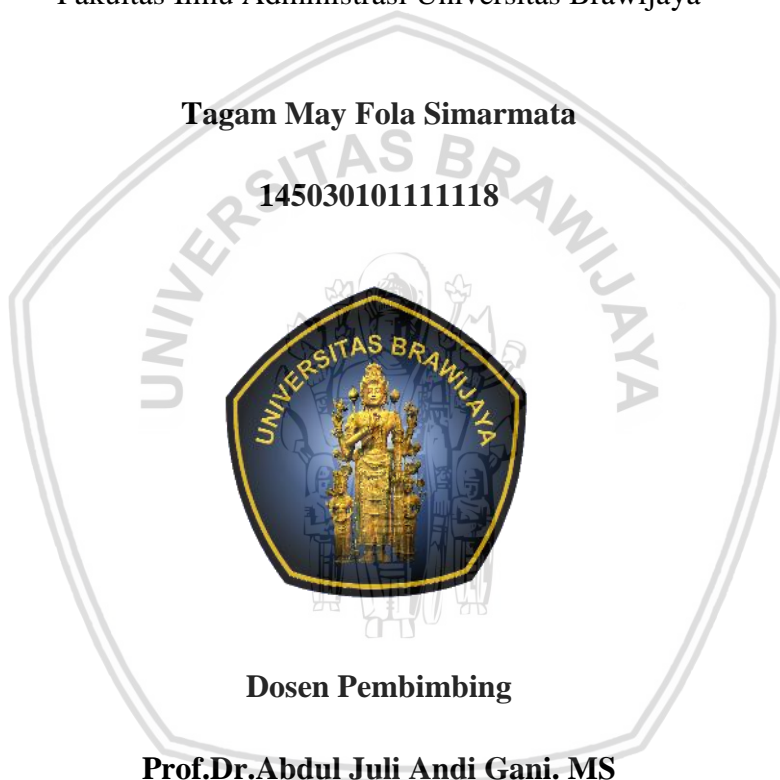
(studi pada Pemerintah Kota Bandung)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Syarat Memperoleh Gelas Sarjana dalam  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Tagam May Fola Simarmata**

**145030101111118**



**Dosen Pembimbing**

**Prof.Dr.Abdul Juli Andi Gani. MS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI MALANG  
MALANG**

**2018**

## MOTTO

**ALWAYS BE GRATEFUL WITH 'WHAT YOU HAVE'**



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku Bapak Janner Simarmata  
dan Ibu Lisbet Hutajulu yang tercinta

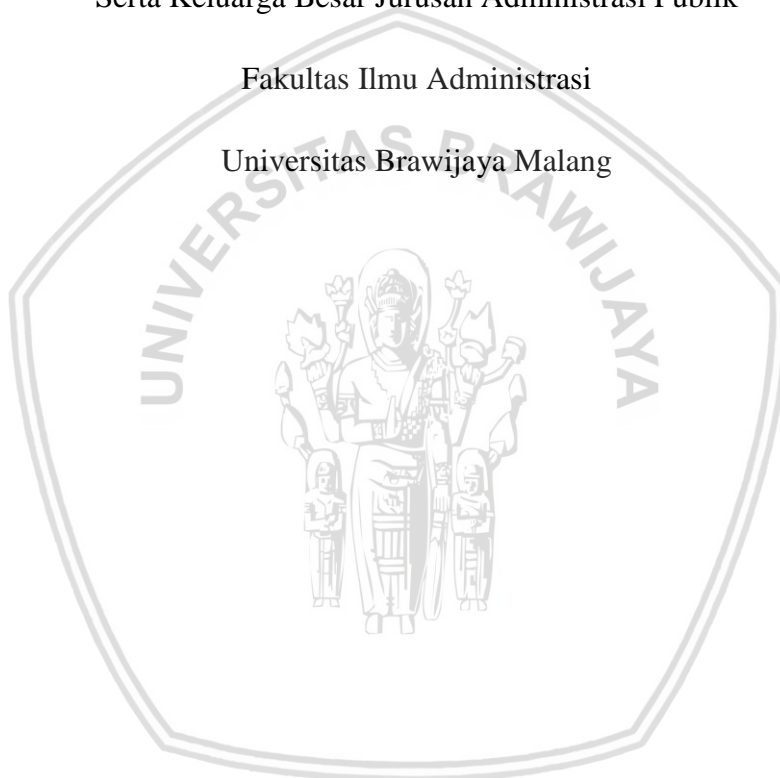
Saudara-saudara ku Patar Simarmata, Mia Audina Simarmata, Judika Simarmata,  
Ketty Simarmata, dan Valentino Simarmata

Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku

Serta Keluarga Besar Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

**TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN**

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)  
Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik (studi pada Pemerintah  
Kota Bandung)

Disusun oleh : Tagam May Fola Simarmata

NIM : 145030101111118

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 12 Desember 2017

Komisi Pembimbing

  
Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani. MS  
NIP. 195407041981031003



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan. Serta di proses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 26 April 2018

Mahasiswa



Nama: Tagam May Fola .S

Nim: 145030101111118

## RINGKASAN

Tagam M F Simarmata. 2018. **Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik(studi pada Pemerintah Kota Bandung)**. Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor informal yang memiliki potensi terpendam bagi Pemerintah Kota yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pemasukan bagi Pemerintah dan masyarakat setempat. Namun banyak di kota-kota besar yang tidak melihat potensi tersebut dan menganggap PKL sebagai faktor yang sangat mengganggu dan harus di musnahkan. Sehingga banyak Pemerintah Kota berusaha untuk melakukan penataan dan penertiban PKL dengan cara agresif dan tidak memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para PKL. Dari fenomena tersebut Pemerintah Kota Bandung berusaha melakukan penataan PKL dengan melakukan pendekatan kepemimpinan demokratik. Dimana setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait Penataan PKL di dasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para PKL itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan demokratik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain (1) strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penatan PKL di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratik.(2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses penataan PKL di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL sudah cukup baik yaitu dengan membentuk Satgas PKL yang merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk dari beberapa SKPD yang mempunyai tugas untuk membantu Walikota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, dan pengawasan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung mencerminkan gaya kepemimpinan demokratik dengan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan keputusan bersama dan mengikutsertakan partisipasi bawahan maupun PKL itu sendiri, proses komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif yang menjangkau semua pihak dengan cara persuasif, adanya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung, serta adanya pemberian motivasi dengan menetapkan tujuan akhir yang memuaskan serta pemberian janji yang konsisten terhadap para PKL.

**Kata kunci: strategi, penataan PKL, gaya kepemimpinan demokratik**



## SUMMARY

Tagam M F Simarmata. 2018. **Strategy of Local Government in Structuring Street Traders (PKL) Through Democratic Leadership Style Approach (Study on Government of Bandung City )**. Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS.

Street Traders (PKL) is one of the informal sector of the economy that has the hidden potential for the City Government which, if managed properly can be a source of income for the local income, can increase people's income growth, and can become a tourism potential. But many in big cities do not see that potential and regard PKL as a very disturbing factor and should be destroyed. So that many City Government trying to do structuring and controlling street vendors in an aggressive way and do not pay attention to welfare and safety of street vendors. From the phenomenon of Bandung City Government trying to do structuring street vendors by doing approach of democratic leadership. Where every action and decision taken related to the arrangement of street vendors is based on the interests and needs of the street vendors themselves.

This study aims to find, describe, and analyze how the arrangement of street vendors made by the Government of Bandung by using the approach of democratic leadership style. This research uses qualitative research type using descriptive method. Data collection used through observation, interviews, and documentation. The research sites are in Spatial Planning, Satpol PP, Small and Medium Enterprises Cooperative Office, and some street vendors. The focus of this research are: (1) the strategy of bandung city Government in the street vendors in the city of Bandung through the style of democratic leadership. (2) supporting and inhibiting factors in the process of arranging street vendors in the city of Bandung.

Based on the research results can be obtained that Strategy of Bandung City Government in doing the arrangement of street vendors is good enough that by forming Satgasus PKL which is a special task force formed from some SKPD mempunyai task to help the Mayor of Bandung in structuring and fostering street vendors including planning , structuring, coaching, and supervision. Leadership style conducted by Mayor of Bandung in implementing strategy of arrangement of street vendors in Bandung reflects democratic leadership style with decision-making process done based on mutual decisions and involving participation of subordinates and street vendors themselves, communication process done is effective enough that reach all parties in the arrangement of street vendors in a persuasive way, the supervision of both directly and indirectly, and the provision of motivation by setting a satisfactory end goal and consistent appointment to the street vendors.

**Keywords:** strategy, structuring street vendors, democratic leadership style

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik(studi pada Pemerintah Kota Bandung)” ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode 2012-2017 dan Bapak Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS. Selaku komisi pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, nasehat dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu administrasi yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang berguna bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir
6. Segenap staff Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang
7. Seluruh pegawai Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan Dinas UMKM yang selama ini sangat membantu peneliti memperoleh data.
8. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Janner Simarmata dan Ibu Lisbet Hutajulu, terima kasih atas kasih sayang yang tiada batasnya, terima kasih



atas doa-doanya yang selalu menyertai setiap langkah ku dan terimakasih atas segala dukungan serta telah memberikan semua yang terbaik kepadaku.

9. Terimakasih kepada Saudara-saudaraku Patar Simarmata, Audina Simarmata, Judika Simarmata, Ketty Simarmata, dan Valentino Simarmata karena telah memberikan motivasi dan kasih sayangnya selama ini.
10. Sahabat-sahabatku dikampus (Okta, Prissel, Nila, Romi, dan Astri) terimakasih telah memberiku motivasi dan mewarnai kehidupan perkuliahanku.
11. Saudara from the other Mom ( C2K) terimakasih telah mengulurkan tangan yang hangat ke padaku dan terimakasih telah menjadi salah satu bagian yang menarik dalam kehidupan ku.
12. Terimakasih kepada my Kemahsaya karena telah memberi motivasi dan penghiburan

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dalam rangka proses pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Disamping itu, penulis juga berharap agar skripsi ini berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, baik kalangan Akademis maupun Non-akademis. Semoga skripsi ini juga dapat menambah wacana dan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Malang, 30 April 2018

Penulis

## Daftar Isi

MOTTO .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Strategi.....	9
1. Pengertian Strategi.....	9
2. Komponen – Komponen dalam Strategi .....	11
3. Manfaat Strategi .....	13
4. Manajemen strategi .....	14
B. Pemerintah Daerah .....	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	17
2. Peran Pemerintah Daerah .....	18
C. Pelayanan Publik .....	23
1. Defenisi pelayanan publik .....	23
2. Azaz Pelayanan publik .....	25
3. Kualitas Pelayanan Publik.....	26
D. Kepemimpinan .....	28
1. Pengertian Kepemimpinan .....	28
2. Teori Kepemimpinan.....	30
3. Fungsi Kepemimpinan.....	34
4. Syarat Pemimpin .....	37
5. Tipe – Tipe Gaya Kepemimpinan .....	38
E. Kepemimpinan Demokratik .....	40

1. Pengertian Kepemimpinan Demokratik .....	40
2. Metode Kepemimpinan Tipe Demokratik .....	42
3. Pendekatan Gaya Kepemimpinan dalam Kepemimpinan Demokratik .....	43
BAB III .....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Fokus Penelitian .....	46
a. Lokasi Penelitian .....	47
b. Jenis dan Sumber Data .....	48
c. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Instrumen Penelitian.....	51
E. Analisa Data .....	52
BAB IV .....	54
HASIL PEMBAHASAN .....	54
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Kota Bandung .....	54
a. Sejarah Singkat Kota Bandung.....	54
b. Kondisi Geografis Kota Bandung .....	56
c. Visi dan Misi .....	59
d. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung.....	60
2. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	61
a. Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung .....	61
b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG).....	65
c. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.....	66
d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung .....	66
B. Penyajian Data PKL .....	67
1. Pembagian zonanisasi dan Jumlah PKL Kota Bandung.....	67
2. Jumlah dan Jenis PKL di Kota Bandung .....	69
3. Asal (KTP) PKL di Kota Bandung.....	70
4. Tingkat Pendidikan.....	71
C. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	72
1. Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui gaya Kepemimpinan Demokratrik. ....	72

1)	Perencanaan dan Pendataan Yang Dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) .....	76
2)	Penataan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang.....	80
3)	Bidang pembinaan yang diurus oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.....	86
4)	Bidang Pengawasan yang diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang Bertugas Sebagai Pengendalian dan Penegakan Hukum.....	93
2.	Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Penataan PKL Di Kota Bandung melalui Gaya Kepemimpinan Demokratik.....	98
a.	Faktor Pendukung.....	98
1)	Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL .....	98
2)	Program Kemitraan.....	101
b.	Faktor Penghambat.....	103
1)	Anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana.....	103
2)	Banyaknya PKL yang Berasal Dari Luar Kota Bandung .....	104
D.	Analisis dan Hasil Pembahasan.....	107
1.	Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratrik ...	107
1)	Perencanaan dan Pendataan PKL yang dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) .....	110
2)	Penataan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang.....	113
3)	Bidang Pembinaan yang Diurus Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.....	116
4)	Bidang Pengawasan yang Diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.....	121
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penataan PKL di Kota Bandung.....	125
a.	Faktor Pendukung.....	125
1)	Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL .....	125
2)	Program Kemitraan.....	127
b.	Faktor Penghambat.....	128
1)	Anggaran Yang Terbatas Untuk Memfasilitasi Sarana dan Prasarana ....	128
2)	Banyaknya PKL Yang Berasal Dari Luar Kota Bandung.....	129
BAB V	.....	132

PENUTUP .....	132
A.    Kesimpulan.....	132
1.  Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratrik ...	132
B.    Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA .....	138
PEDOMAN WAWANCARA.....	141
LAMPIRAN.....	143



### Daftar Tabel

TABEL 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Kuas Tiap Kecamatan.....	61
TABEL 2 Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2015.....	73
TABEL 3 Jumlah dan Jenis PKL di Kota Bandung.....	74
TABEL 4 Asal (KTP) PKL Kota Bandung.....	75
TABEL 5 Tingkat Pendidikan PKL di Kota Bandung.....	76





## Daftar Gambar

Gambar 3.1	
Model Analisa data Interaktif.....	56
Gambar 4.1	
Peta Administrasi Kota Bandun.....	57
Gambar 4.2	
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung.....	64
Gambar 4.3:	
Penataan PKL Cihampelas.....	85
Gambar 4.4:	
Relokasi PKL Balonggede.....	86
Gambar 4.5:	
BinTek dengan para PKL basement Alun-Alun Kota Bandung.....	90
Gambar 4.6:	
Kegiatan temu usaha antara PKL Ujungberung dengan lembaga keuangan.....	91
Gambar 4.7:	
Relokasi PKL yang disponsori oleh Teh Botol Sosro dan Lee Mineral.....	92
Gambar 4.8:	
acara promosi dan pengenalan lokasi PKL yang telah di relokasi.....	93
Gambar 4.9:	
Pak Ridwan Kamil mendatangi pedagang di <i>skywalk</i> dan Balonggede cihampelas.....	105





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mewujudkan suatu pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka diperlukan adanya suatu pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, instansi, maupun aparatur pemerintah yang berada di daerah. Pemberian kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui desentralisasi, yang mana menurut Rodinelli dalam Yudhoyono (2001,20) Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintah yang disebut dengan swasta. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kekuasaan kepada daerah masing-masing untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang kependudukan, ekonomi, politik, dan sosial budayanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan juga membawa dampak problematika yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat karena semakin cepatnya arus informasi dan transformasi nilai dalam kehidupan era globalisasi yang saat ini sedang melanda seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Dampak tersebut dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang sulit diatasi dalam pertumbuhan dan perkembangan penyediaan sarana dan

prasarana yang selalu lebih lambat dari pada tuntutan kebutuhan penduduk kota yang terus menerus meningkat dan berjalan cepat. Sehingga setiap lapisan masyarakat dituntut bersaing secara kompetitif dalam pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan data kemiskinan dan ketimpangan dari BPS, jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 27,7 juta jiwa, dimana penduduk kota miskin sebanyak 10,4 juta jiwa dan penduduk desa miskin mencapai 17,2 juta jiwa di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jauh lebih banyak jumlah penduduk miskin yang berada di desa dari pada di kota sehingga banyak masyarakat Indonesia yang melakukan urbanisasi dan berbondong-bondong datang ke kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Faktor penyebab terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota yang paling utama adalah hal penyediaan lapangan kerja serta upah kerja yang lebih besar di perkotaan dari pada di desa, faktor lain penyebab urbanisasi dari desa ke kota adalah penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap serta pendidikan yang lebih baik di perkotaan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat desa untuk datang ke perkotaan. Banyak masyarakat desa tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan urbanisasi ke kota besar sehingga kecenderungan usaha yang dapat mereka lakukan adalah bidang sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor informal dalam kegiatan perekonomian Kota. UU RI No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa usaha sektor informal adalah kegiatan orang perorangan atau beberapa orang yang

melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan imbalan. Sektor informal menjadi salah satu aktivitas penting perkotaan yang membentuk elemen kota (Nitisudarmo.2009). Namun PKL juga sering dikenal dengan istilah untuk para pedagang yang berdagang dengan menggunakan gerobak atau yang sering dikenal dengan sekumpulan pedagang yang menjual dagangannya ditepi-tepi jalan umum, trotoar, dan jauh dari kesan bersih dan rapih. Menurut Nurul (2008) Pedagang Kaki Lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kehidupan, dan melakukannya di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Beberapa kasus khususnya di kota-kota besar, kehadiran Pedagang Kaki Lima sering di pandang sebagai masalah yang serius seperti mengganggu lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu kebersihan lingkungan, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejalan kaki karena ulah PKL yang berjualan di atas trotoar dan menggunakan fasilitas umum lainnya serta berdagang di tempat yang tidak sesuai dengan tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah. Sudah banyak pemerintah kota/kabupaten yang berusaha dalam menyelesaikan permasalahan PKL ini dengan melakukan pengusuran-pengusuran, namun para PKL tetap muncul lagi setelah pengusuran selesai. Pertentangan kepentingan antara keindahan dan ketertiban kota dengan pertahanan hidup bagi Pedagang Kaki Lima tampaknya tidak kunjung usai dan



menjadi persoalan yang berkepanjangan. Melihat realita di atas, semua pihak perlu melihat persoalan secara adil dan manusiawi dengan cara mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan bagi sebagian pihak saja. Sehingga di sini perlu peran pemerintah Kota/Kabupaten untuk membantu masyarakatnya dalam mendapatkan pekerjaan serta tetap menjaga dan melindungi setiap pekerjaan yang telah di geluti masyarakatnya termasuk PKL.

Kota Bandung yang telah berkembang menjadi kota besar juga tidak terlepas dari permasalahan PKL. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung, jumlah PKL meningkat 10% dari tahun 2012-2015 dimana jumlah PKL pada tahun 2012 sebanyak 20.326 orang pedagang dan pada tahun 2015 jumlah itu meningkat menjadi 22.359 orang pedagang. Sehingga dapat dilihat bahwa penertiban dan penataan PKL bukanlah hal yang mudah. Seperti yang kita pahami bahwa sangat mustahil bagi sebuah kota besar untuk dapat steril dari kehadiran PKL. Keberadaan PKL pada dasarnya semata-mata bukan hanya menjadi beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota, namun PKL juga merupakan sebuah potensi terpendam bagi pemerintah kota yang jika di kelola dengan baik dapat menjadi sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, dapat menjadi potensi pariwisata, potensi ekonomi rakyat yang memilih fungsi sebagai penyerapan tenaga kerja, dan merupakan sektor informal yang bersifat efisien dan ekonomis. Namun banyak Kota-Kota besar yang tidak melihat potensi tersebut dan menganggap PKL sebagai faktor yang sangat mengganggu dan harus di musnahkan, sehingga hal inilah yang kemudian munculnya kecenderungan perilaku agersif pada para Pedagang Kali Lima (PKL). Perilaku agresif yang di

lakukan merupakan reaksi terhadap suatu yang menekan atau mengganggu dan dilampiaskan keluar dalam bentuk perilaku fisik maupun verbal.

Kasus penertiban PKL di Kota-Kota besar telah banyak memakan korban seperti pada Rabu 17 November 2017 tepatnya pukul 08.00 WIB sejumlah PKL di kawasan Bojongmeron, Kabupaten Cianjur mengalami luka-luka karena tindak kekerasan Satpol PP Cianjur. Para pedagang diketahui mendapat pukulan, hingga salah satunya muntah-muntah akibat mendapat pukulan dibagian perut. Berdasarkan konfirmasi, aksi arogan dari penegak Perda tersebut merupakan kejadian yang kedua kali, setelah sebelumnya seorang pramuniaga sebuah toko souvenir juga menjadi korban pukulan satpol PP. Awalnya sejumlah PKL tidak terima barang dagangannya diambil dan mencoba untuk memintanya kembali namun tiba-tiba ada intruksi dari Satpol PP untuk langsung melakukan penyerangan (sumber: Berita Cianjur. 2017)

Pada Tahun 2011 Pemda Kota Bandung mengesahkan Perda No 04 Tahun 2011 Tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Perda tersebut merupakan usaha pemerintah Kota Bandung untuk mengatur, menata dan membina PKL di Kota Bandung dengan tujuan untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, tertib dan menjadi kota tujuan wisata. Perda tersebut disempurnakan dan diperjelas dengan adanya PERWAL Kota Bandung No.888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 04 Tahun 2011 dimana perwal ini mendefenisikan pembagian 3 zona yang meliputi Zona merah sebagai lokasi bebas PKL yaitu sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan lokasi 7 titik yang meliputi: Alun-Alun Kota (Mesjid Raya Bandung), Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan

Kepatihan, Jalan Dalem Kaun, Jalan Otto Iskandar Dinata, dan Jalan Merdeka. Zona kuning (terbatas berdasarkan waktu dan ketentuan) yaitu seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu pukul 22.00 WIB – 06.00 WIB. Zona hijau (tempat yang diperbolehkan bagi para PKL) yaitu lokasi relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Ketegasan aparaturnya dalam pengimplementasian kebijakan peraturan Walikota serta kepatuhan masyarakat maupun PKL terhadap peraturan yang telah dibuat menjadi kunci utama terciptanya Kota Bandung yang tertib dan rapih. Penataan PKL bukan lah permasalahan yang mudah di kota besar, sebab yang harus di lakukan pemimpin bukanlah hanya menggusur tetapi bagaimana pemimpin tersebut dapat memberikan solusi ekonomi berupa tempat baru yang lebih layak untuk pedagang dan dapat mempengaruhi para PKL agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Pemimpin yang diharapkan juga harus mampu menetapkan berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan bersama antara pimpinan, bawahan dan masyarakat seperti halnya pemimpin yang demokratik. Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Kota Bandung merupakan peraturan yang berlandaskan pada kepentingan Kota, masyarakat dan kepentingan PKL itu sendiri.

Dari masalah di atas memberi gambaran bahwa penataan PKL di berbagai daerah di Indonesia masih di lakukan dengan cara kekerasan, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “**Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

## **Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik(studi pada Pemerintah Kota Bandung)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratrik.?
2. Apa saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Penataan PKL Di Kota Bandung melalui Gaya Kepemimpinan Demokratik.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratrik. Untuk mengetahui bagaimana upaya pendekatan yang di lakukan oleh Walikota Bandung dalam penataan PKL
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Penataan PKL Di Kota Bandung melalui Gaya Kepemimpinan Demokratik.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos*. Adapun pengertian *strategos* yaitu dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang, serta akal atau cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Namun seiring berkembangnya zaman, kata strategi tidak hanya terbatas pada konsep sempit dalam kata peperangan. Akan tetapi mencakup banyak hal dan ilmu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim dalam bekerja dan dapat mencakup keseluruhan masalah yang dihadapi dengan melihat sisi eksternal maupun internalnya.

Menurut Sumarsono (2006:139) dalam Dermawan (2015: 18) strategi pada dasarnya merupakan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Salusu (2008:101) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan ataupun sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan cara menggunakan hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan Pasolong (2010:90) berpendapat jika strategi merupakan suatu kiat, cara ataupun taktik yang dirancang secara sistematis dalam menjalankan



fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi merupakan sebuah kiat atau usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi dan untuk dapat mengimplementasikan misinya. Rancangan tersebut meliputi: tujuan, kebijakan, serta tindakan yang harus dilakukan. Namun strategi dapat juga gagal terlaksana jika organisasi tersebut tidak memiliki keselarasan antara apa yang direncanakan, apa yang diusahakan, dan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Goldsworthy dan Ashley dalam Dermawan (2015:19) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, yakni sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
2. Arah strategi harus dapat menentukan rencana, dan bukan sebaliknya rencana yang menentukan strategi.
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata pada pertimbangan keuangan.
4. Harus diaplikasikan dari atas ke bawah.
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
6. Strategi yang digunakan harus bersifat fleksibel.
7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Agar strategi dapat berjalan dengan baik, Hatten dan Hatten sebagaimana yang dikutip oleh Salusu (2008) memberikan petunjuk sebagai berikut:

- 1) Strategi harus konsisten dengan lingkungannya, dimana strategi yang dibuat harus mengikuti arus perkembangan masyarakat di dalam lingkungan, dimana lingkungan sebagai pemberi peluang untuk bergerak maju.
- 2) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, melainkan tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dirancang maka harus ada satu strategi yang konsisten terhadap strategi lainnya. Dan tidak boleh bertenangan ataupun bertolak belakang satu sama lain.

- 3) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan seluruh sumber daya antara berbagai unit kerja dalam organisasi dan tidak menceraikan satu sama lain. Persaingan yang tidak sehat antar unit kerja sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu tersebut dapat merugikan pihak-pihak lain yang ada di organisasi tersebut.
- 4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang menjadi kekuatannya, bukan kelemahannya. Hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- 5) Strategi yang dibuat hendaknya memang layak dan dapat diimplementasikan
- 6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi agar tidak menimbulkan masalah terhadap organisasi maupun lingkungannya. Sehingga strategi harus dikontrol dengan baik.
- 7) Strategi hendaknya disusun atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- 8) Tanda-tanda suksesnya sebuah strategi ditandai dengan adanya dukungan dari pihak – pihak yang terkait dengan para eksekutif serta pimpinan unit di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tata cara atau suatu rencana yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta tindakan yang ingin dilaksanakan baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

## **2. Komponen – Komponen dalam Strategi**

Pelaksanaan strategi nantinya juga akan bergantung pada komponen-komponen internal dan eksternal yang ada pada organisasi. Komponen ini lebih menekankan pada cara organisasi merespon kondisi yang ada dan menuangkannya pada pengambilan strategi. Secara umum Salusu (2002:24) menjabarkan ada 4 komponen dalam penyusunan strategi yaitu:

1. Tipe dan Struktur Organisasi

Setiap organisasi memiliki karakteristik sendiri-sendiri berdasarkan visi dan misi organisasinya. Pada umumnya organisasi memiliki unsur yang sama yaitu adanya struktur dan tingkatan jabatan. Bentuk hierarki yang demikian tentu memberikan batasan-batasan pengambilan keputusan pada perencanaan strategi. Pimpinan organisasi harus mampu membuat keputusan strategi yang tepat agar langkah organisasi menuju tujuannya tidak terlambat.

## 2. Gaya Manajerial

Kepemimpinan dan gaya manajerial pada suatu organisasi akan lebih efektif apabila menerapkan model kepemimpinan yang situasional. Artinya keputusan yang diambil dapat berubah dan dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Manajerial dalam organisasi juga akan lebih efektif apabila didukung dengan kapabilitas personal organisasi yang tinggi dari segi pendidikan, mental dan intelektual.

## 3. Kompleksitas Lingkungan

Kompleksitas lingkungan dalam hal ini dipengaruhi oleh aktivitas pihak-pihak diluar organisasi. Selain berusaha merespon kompleksitas tersebut, organisasi juga harus dapat memprediksi skenario yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Identifikasi pihak-pihak di luar organisasi tentu menjadi penting agar mempermudah dalam membuat prediksi-prediksi tertentu. Selain itu, responsifitas yang dinamis diperlukan untuk menyiasati sebagai kemungkinan yang akan muncul.

#### 4. Tingkat Kesulitan Masalah

Setiap organisasi memiliki berbagai persoalan tersendiri sesuai dengan fokus kerja yang dilaksanakan. Masalah dan sifat masalah yang dihadapi setiap organisasi berbeda-beda. Organisasi yang baik harus melakukan analisis informasi atas masalah yang muncul. Tujuannya adalah merencanakan strategi dengan cara alternatif yang efektif dan efisien. Hasil yang ingin dicapai tentunya adalah masalah dapat terselesaikan dan berdampak lebih luas yaitu akar masalah yang dapat ditangani dan tidak lagi menimbulkan gejala masalah yang sama.

### 3. Manfaat Strategi

Strategi mencerminkan fenomena organisasi dalam jangka menuju tujuan yang diinginkan dan mengukur tingkat keberhasilan terhadap apa yang telah dicapai. Strategi organisasi memerlukan pengukuran tingkat keberhasilan agar aktifitas organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Suatu strategi yang optimal tentunya memberikan manfaat yang baik bagi organisasi. Manfaat tersebut adalah dapat membantu organisasi melakukan kegiatan dan aktivitasnya dengan lebih logis, rasional, dan sistematis. Siagian (2002:200) menuliskan 5 manfaat strategi yang dilakukan oleh organisasi, yaitu:

- a) Identifikasi rincian informasi mengenai tata kelola organisasi di berbagai bidang agar mengoptimalkan suatu perencanaan pada organisasi
- b) Mengefektifkan langkah-langkah yang diputuskan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi.
- c) Strategi dapat berfungsi sebagai pegangan, penuntun dan arahan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan.
- d) Menentukan skala prioritas terhadap apa yang akan diupayakan terlebih dahulu melalui langkah-langkah yang sistematis.

- e) Mempermudah koordinasi secara internal diantara organisasi dan terjalin komunikasi yang interaktif sehingga mengurangi resiko konflik internal.

#### 4. Manajemen strategi

Manajemen strategi terdiri atas dua suku kata yang dapat dipilih menjadi kata manajemen dan strategi. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan penganggaran (*budgeting*) (Nawawi, 2005:46).

Unsur-unsur dalam manajemen tersebut apabila dijabarkan dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### a.) Perencanaan (*planning*)

Suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) Pemilihan dan penempatan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- 2) Pemilihan sejumlah kegiatan yang diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang akan dilaksanakannya.
- 3) Penetapan secara sistematis, pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan

- 4) Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan yang berisi langkah-langkah terarah dalam pencapaian tujuan tertentu.

b.) Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembagian dan pembagian seluruh kerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal.

c.) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melaksanakan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit satuan kerja yang dibentuk.

d.) Penganggaran (*budgetting*)

Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya. Karena fungsi ini berkaitan dengan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi berhubungan dengan kegiatan tata laksana keuangan. Kegiatan fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan dana secara efektif dan efisien.

e.) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan atau control harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik, fungsi ini dilakukan manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang



dilakukan dalam satuan atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) atau menilai (*evaluatumg*) tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efesiensi penggunaan sarana kerja dalam memeberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

## **B. Pemerintah Daerah**

Negara indonesia merupakan suatu bangsa yang yang merdeka dan berdaulat, dimana di dalamnya terdapat pemerintah daerah yang memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir tersebut ialah memiliki masyarakat yang adil makmur, adil material, dan adil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di rumuskan dan lebih terperinci dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan yang kekal.”

Karena banyak dan luas urusan pemerintahan itu, sehingga tidak mungkin seluruhnya di urus oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, urusan negara memerlukan berbagai alat perlengkapan negara untuk dapat mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian timbullah pembagian wilayah negara atau sejumlah pemerintah daerah-daerah negara yang sering disebut dengan *Local Government*. (Victor dan Dra, 1993:19).

Dalam pemerintahan daerah, terdapat dua jenis pemerintah yakni: Pemerintah daerah otonom (daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) sebagai pelaksana azaz desentralisasi, dan Pemerintah wilayah, sebagai pelaksanaan azaz dekonsentralisasi yang mana pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Pelimpahan wewenang ini hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap berada di tangan pusat. Sistem pemerintahan di daerah yang mula-mula di pakai adalah sistem sentralisasi dimana segala urusan-urusan dan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah di buatkan dalam tangan pemerintah pusat. Namun, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau yang masing-masing mempunyai keadaan dan sifat yang berbeda-beda, maka sistem pemerintahan yang di pakai berubah dan diganti menjadi sistem pemerintahan desentralisasi, dimana segala urusan dan kewenangan yang berada dalam suatu daerah tersebut menjadi urusan pemerintah daerah itu sendiri. (Irawan, 1981:25)

Pelaksanaan *local goverment* memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam akses mendapatkan pelayanan publik karena lebih dekat dengan dianggap lebih mengetahui keadaan riil masyarakat setempat dari pada pemerintah pusat. Tersedianya sarana dan prasarana dari pemerintah daerah untuk kebutuhan publik merupakan harapan dari adanya desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi akan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis.

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pembangunan daerah dilaksanakan oleh instansi perencana yang berada dalam bidang pemerintahan, yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu diketahui mengenai pengertian pemerintah. Seperti yang tertulis dalam buku (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1990:17) bahwa kata pemerintah berasal dari bahasa Inggris "*government*" artinya kemudi. Secara etimologis pemerintah merupakan kata subjek yang

berdiri sendiri. Dimana sebagai subjek, pemerintah adalah orang-orang yang melakukan tugas dan kegiatannya. Dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah. Dalam UU No 5 tahun 1974 di tentukan dengan tegas bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 13 ayat 1).

Sesuai dengan UU no 32 Th 2004 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang di maksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebaagai penyelenggara pemerintahan daerah. De Guzman dan Taples (dalam Yuriza Prameswari, 2015:11), menyebutkan unsur-unsur pemerintah daerah yaitu:

- a. Pemerintah daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
- b. Pemerintah daerah di atur oleh hukum.
- c. Pemerintah daerah di atur oleh badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
- d. Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

## **2. Peran Pemerintah Daerah**

Dalam menjalankan pemerintahan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal yang ada didalam daerahnya sendiri sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang ekonomi lokal. Muluk (2009) dalam Wida Ristanti (2016:21) menjelaskan bahwa pandangan tradisional tentang peran pemerintah daerah

mengacu pada apa yang di ungkapkan oleh Adan Smith dalam bukunya yang terkenal, *Wealth of Nasion*, bahwa pemerintah memiliki tugas sejauh mungkin untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran, ketidakadilan dan tekanan dari anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan keadilan administrasi secara pasti. Kebutuhan masyarakat diluar hal ini harus dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain.

Selain melindungi masyarakat, pemerintah juga memppunyai peran yang sangat peting dalam pembangunan. Dimana tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya tugas pemerintah semata-mata. Namun, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan penting dalam proses pembangunan dalam suatu daerah. Menurut (Siagian, 2001:142-149) yang di kutip oleh Wida Aristanti , 2016 menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam 5 wujud utama antara lain:

**a. Selaku stabilisator**

**1. Stabilisator bidang politik**

Peran pemerintah dalam bidang poitik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dan kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak heti-hentinya antara berbagai kekuatan politik yang tajam. Rongrongan dari luar biasanya datang dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin menetapkan pengaruh dan bahkan memperluas hegemoninya.

## 2. Stabilitas ekonomi

Dengan ini diharapkan peran pemerintah untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan perekonomian dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga: (a) ekonomi tumbuh secara wajar, (b) suku bunga yang tidak tinggi, (c) rendahnya inflasi, (d) kesempatan berusaha semakin luas, (e) proses industrialisasi berlangsung dengan baik, (f) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

## 3. Stabilitas sosial budaya

Pemerintah diharapkan mampu menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa mempertahankan jati diri memang sangat penting karena jati diri itulah yang merupakan kekhasan suatu bangsa seperti unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan namun di lain pihak bangsa yang bersangkutan harus mau menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Peran pemerintah sebagai stabilitator, yaitu dalam mewujudkan hal perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tapi efektif, melalui pendidikan,

pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

#### **b. Selaku Inovator**

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru. Jadi praondisi yang harus dipenuhi agar efektif dalam memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan, ada tiga hal lain yang mutlak dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, yaitu:

*Pertama*, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Jika inovasi yang diterapkan pemerintah terhadap birokrasi dapat berjalan baik, seperti: aparatur mampu bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan, dan cara berpikir yang didasarkan pada pelayanan maka pemerintah akan dapat merubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi dan inovasi yang akan ditawarkan ke masyarakat pun akan lebih mudah diterima.

*Kedua*, inovasi yang sifatnya konsepsional. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus menjadi sumber dari ide-ide baru, karena mereka mempunyai hal yang menonjol dalam pembuatan keputusan dan kewenangan terhadap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, birokrasi harus mampu mengambil keputusan tanpa mempersoalkannya, mampu menganalisis apakah keputusan yang diambil itu untuk kepentingan masyarakat atau tidak.



*Ketiga*, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja serta pendekatan yang mampu bersifat “*problem-soving*” dan *áction-oriented*” . yang dimaksud dengan pendekatan demikian adalah pemerintah bersedia meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul ,dan kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang ilmiah sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi dapat menghilangkan fakktor-faktor penyebabnya.

#### **c. Selaku Modernisator**

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolaah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, dan pemberdayaan rakyat, ketersediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang terprogram dan berkelanjutan.

#### **d. Selaku Pelopor**

Pemerintah harus memainkan pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor, aparaturnya harus menjadi panutan bagi seluruh kalangan masyarakat. Peloporan yang dapat dilakukan pemerintah misalnya kepeloporan dalam menegakkan



kedisiplinan, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

#### **e. Selaku Pelaksana Sendiri**

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan kerja, mosal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai. karena tidak diminati oleh masyarakat dan kerana konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Sebagaimana fungsi pemerintah tersebut sebagai stabilitator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi pemerintah harus terjalin secara berkesinambungan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik. Dengan adanya kesinambungan, maka pemerintah akan mengetahui dengan jelas pokok dan fungsi- masing-masing seluruh pencapaian yang menjadi tujuan negara.

### **C. Pelayanan Publik**

#### **1. Defenisi pelayanan publik**

Secara umum pengertian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. Namun dalam arti sempit,

pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar (Djumara,2009:15).

Pelayanan publik merupakan pengadaan barang dan jasa publik , baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Menurut (Sinambela, 2006 :14) terdapat dua jenis barang publik, yaitu: (1) Barang publik (*pubic good*) merupakan barang yang penggunaannya memiliki ciri *nonrivalry* seperti udara, jalan, jembatan, dan sebagainya.(2) Barang swasta (*privat good*) merupakan barang yang sifatnya *rivalitas* seperti baju, sepatu, dan sebagainya. Adapun barang publik maupun barang privat di tentukan oleh konsumen. Bedanya persediaan barang swasta ditentukan oleh produsen untuk bertujuan memperoleh keuntungan, dan barang publik ditetapkan melalui proses politik.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan swasta maupun pemerintahan. Sehingga dalam kondisi ini, setiap lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Seperti halnya lembaga pemerintah dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Undang–Undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefenisikan pelayanan publik sebagai berikut: pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pemerintahan. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang di atur dalam perundang-undangan. Dalam rangka lingkup tersebut, termasuk pendidikan, lingkungan hidup, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbantuan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik).

Pelayanan publik menurut Robert dalam Bagus Purnama (2015: 28) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang maupun jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban ketertiban.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan publik secara adil, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Azaz Pelayanan publik**

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut, penyedia pelayanan dituntut

untuk memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut menurut (Sinambela,2006:6):

1. Transparansi: yaitu pelayanan yang bersifat terbuka , mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan penyediaannya memadai erta mudah untuk dimengerti.
2. Akuntabilitas: yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/
3. Kondisional: yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif: yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak: yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban : yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Setiap pemebri dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

### **3. Kualitas Pelayanan Publik**

Kata kualitas memiliki banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Devenisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari : kinerja

(*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*ease of use*), dan estetika (*esthetics*). Dan definisi strategis dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, terdapat beberapa kriteria yang dapat menunjukkan pelayanan yang diberikan dinilai baik atau buruk. Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) dalam (Sabaruddin, 2014:12) menguraikan dalam mendeskripsikan hal tersebut, terdapat lima (5) dimensi yang harus diperhatikan untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Tangibles yaitu terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki penyedia pelayanan.
2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dalam menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.
5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

Menurut Albecht dan Zemke (1990) dalam Sabbaruddin (2014:12) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan (customers). Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik, akan memiliki prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta memiliki mekanisme kontrol didalam dirinya sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi dapat secara mudah diketahui.

Kaitannya dengan sumberdaya manusia, karena di butuhkannya petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan publik yang telah di sediakan. Sistem pelayanan juga harus sesuai dengan pelanggan (customers) karena suatu lembaga yang menyediakan pelayanan publik tersebut harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan pengguna dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.

#### **D. Kepemimpinan**

##### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Dalam bahasa inggris pemimpin disebut dengan *leader* yang berarti penggerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat terlebih dahulu, mempelopori, dan lain-lain. (Moekijat:1984:124 ) menuliskan bahwa siapa yang dapat memimpin dan menggerakkan orang orang yang ada di bawah kekuasaannya berarti ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Menggerakkan orang (manusia) ini bukan dengan menggunakan sifat paksaan seperti dengan memberikan intruksi-intruksi / perintah-perintah melainkan dengan suatu tindakan yang dapat menimbulkan suka bekerja pada seseorang yang berada dalam kelompoknya.

Fungsi seorang manajer berbeda dari fungsi seorang leader. Fungsi manajer menurut George R. Terry dalam buku Moekijat : 1984 yaitu: Merencanakan (planning), Mengorganisasikan (Organizing), Menggerakkan (actuating), Mengawasi (controlling) sedangkan fungsi dan tugas seorang leader hanya menggerakkan saja, jadi hanya merupakan sebagian dari pada tugas seorang manajer.



Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Prof.Dr.R.Aifin Abdulrachman dalam buku (Moekijat:1984:136 ) menuliskan yang dimaksud dengan pemimpin ialah orang yang dapat menggerakkan orang lain yang ada di sekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepemimpinan ialah kemampuan atau seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, atau kemampuan untuk membimbing manusia.

Banyak sekali orang yang telah mencoba mendefinisikan tentang Kepemimpinan. namun demikian, semua pengertian kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama, seperti yang dikemukakan Ordway Tead dalam buku Moekijat bahwa Kepemimpinan adalah suatu seni untuk menjuruskan, mengkoordinasikan dan menggerakkan orang-orang serta dolongan orang-orang guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Kartono dalam Frahlevi,2012:27 menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha yang kooperatif dalam mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Kebanyakan definisi dari kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa seorang pemimpin harus dapat berinteraksi secara sosial agar dapat menjalin hubungan dalam suatu kelompok atau organisasi.

Dari berbagai pengertian kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alamiah yang dapat berpengaruh terhadap proses sosial, dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu ikatan kerjasama



agar mau bertindak sesuai dengan apa yang di harapkannya dan mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan di butuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Terdapat 4 alasan mengapa seorang pemimpin sangat di perlukan, yaitu: (a) karena banyak yang memerlukan figur pemimpiin, (b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil untuk mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, dan (d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. (Rivai. 2004:2)

Teori kepemimpinan merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitik beratkan pada latar belakang historis, sebab musabab, dan sifat-sifat utama kepemimpinan(Rivai.2004:11). Dalam teori kepemimpinan, kepemimpinan dilihat lewat perilaku organisasi, Orientasiperilaku ini mencoba menitiktengahkan pendekatan yang bersifat *social lerning* pada kepemimpinan. Adanya faktor penentu dalam kepemimpinan seperti pemimpin sendiri , situasi lingkungan , dan perilaku dari pemimpin sendiri merupakan dasar dari teori kepemimpinan . Berikut beberapa teori-teoti timbulnya kepemimpinan dalam buku Sunindhia & Widiyanti (1993:46-53):

### a) Teori Bakat

Seorang pemimpin harus memiliki bakat, namun bakat tersebut harus dikembangkan dengan melatih diri dalam sifat-sifat dan kebiasaan

tertentu dengan berpedoman kepada teori teori tentang bagaimana sifat yang seharusnya di miliki oleh seorang pemimpin (berpendidikan & berpengalaman). Misalnya seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan-kelebihan yang cukup dan dapat meyakinkan para bawahannya. Seorang pemimpin memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi.

b) Teori Lingkungan

Teori ini menjelaskan bahwa munculnya para pemimpin merupakan hasil pembentukan dari waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Lingkungan sosial dapat menjadi faktor terbentuknya seorang pemimpin. Seperti, Suatu tantangan yang hebat atau suatu kejadian penting yang luar biasa yang sering terjadi dilingkungan dapat menampilkan seseorang menjadi seorang pemimpin.

c) Teori Hubungan Kepribadian dengan Situasi

Kepemimpinan seseorang itu ditentukan oleh kepribadiannya, dengan penyesuaiannya terhadap situasi dan kondisi yang dihadapinya. Situasi dan kondisi ini terdiri dari 3 lapis yaitu: (1). tugas, pekerjaan, masalah-masalah yang dihadapi: (2) orang-orang yang dipimpin: (3) keadaan yang mempengaruhi pekerjaannya serta orang-orang yang harus menjalankan pekerjaan tersebut. Seorang pemimpin harus mengenal dirinya, mengenal kelompoknya dan juga mengenal pekerjaannya. Pemimpin harus berperan sebagai pembina kelompok yang dipimpin,

dapat menciptakan cara-cara yang gampang yang dapat membuat pekerjaan tampak lebih mudah.

d) Teori Hubungan antar Manusia

Dalam teori ini, seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya harus pandai melakukan hubungan – hubungan antar manusia, yaitu dapat memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan perseorangan dan kepentingan umum organisasi dan dapat memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan orang-orang di dalam organisasi tersebut tanpa merugikan kepentingan organisasi.

e) Teori Beri – memberi ( Timbal Balik)

Teori ini menyatakan bahwa harus ada hubungan timbal balik atau hubungan tukar menukar keuntungan antar pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin yang hanya mengejar keuntungannya sendiri dengan mengorbankan mereka yang dipimpin, akan kecil daya kepemimpinannya. Sebaliknya pemimpin yang mampu memberikan penghargaan kepada anak buahnya akan memperoleh daya kepemimpinan yang tinggi.

f) Teori Kegaitan – Harapan

Menurut teori ini, seorang pemimpin harus mengembangkan kepemimpinannya yang terdiri atas perbuatan – perbuatan yang tidak mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Segala tindakan pemimpin harus dapat memberikan kepercayaan kepada orang – orang yang dipimpinnya.

g) Teori Genetis

Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin memang sudah dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, artinya ia dilahirkan ke dunia ini dengan bakat-bakat kepemimpinannya. Dalam kondisi dan situasi apapun atau dalam keadaan bagaimana pun seseorang itu ditempatkan, pasti ia mempunyai aura yang timbul untuk selalu menjadi seorang pemimpin.

h) Teori Sosial

Teori ini merupakan kebalikan dari teori genetis, artinya bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan atau ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, akan tetapi orang tersebut menjadi seorang pemimpin karena pengaruh dari masyarakat, dari luar, dari pendidikan serta pengalaman yang ia dapatkan.

i) Teori Ekologi

Yaitu teori yang menggabungkan sifat-sifat positif dari teori sosial dan teori genetis. Demikian George R. Terry dalam buku Sunindhia & Widiyanti (1993:46-53) mengemukakan :

- 1) *Teori Suportif*, yaitu pemimpin beranggapan bahwa para pengikutnya ingin berusaha sebaik-baiknya. Mau diberi dukungan dan bersifat patuh, dan pemimpin harus mendorong dan mendukung itikad baik tersebut. Oleh karena itu perlu diciptakan lingkungan kerja yang dapat mempertebal niat untuk bekerja dan dapat mengembangkan keterampilannya. Teori suportif ini disebut pula : *teori partisipatif* atau teori – teori kepemimpinan demokratis.

- 2) *Teori Sosiologis*, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi diantara para pengikutnya, dengan tercapainya kerjasama yang baik, demi keutuhan dan kepentingan kelompok. Pemimpin harus dapat mengambil tindakan korektif jika terdapat kesalahan, kepincangan, atau penyimpangan.
- 3) *Teori psikologis*, fungsi pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi yang terbaik untuk merangsang kesediaan bekerja para pengikutnya. Karenanya ia perlu memperhatikan aspek-aspek psikis/kejiwaan manusia, seperti: harga diri, keinginan dan harapan, kebutuhan, minat, dan sebagainya.
- 4) *Teori Otokratis*, yaitu tipe kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dengan paksaan dan pengawasan yang keras dan ketat. Tidak ada pendelegasian otoritas.

### 3. Fungsi Kepemimpinan

Menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah karena salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan adalah kemampuan dan keuletan pemimpin dalam mengelola potensi ataupun sumber daya yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Untuk mengelola hal tersebut, seorang pemimpin mempunyai beberapa fungsi yang hendaknya dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Adapun fungsi kepemimpinan yang dapat dibedakan menjadi lima

fungsi pokok yang dilihat secara operasionalnya menurut ( Rivai dan Mulyadi (2009:34) yaitu:

a. Fungsi Instruksi

Pemimpin berperan sebagai komunikator yaitu menentukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada pengikut untuk dikerjakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivikasi para bawahan agar mau melakukan apa yang diperintahkan. Fungsi instruktif tidak selalu diterapkan secara otoriter, bila dilakukan dengan cara tersebut maka berpotensi akan menghilangkan kewibawaan seorang pemimpin tersebut.

b. Fungsi Konsultasi

Dalam proses penetapan keputusan, pemimpin membutuhkan masukan –masukan dari bawahan untuk menjadi bahan pertimbangan, sehingga mengharuskan bawahan untuk merkonsultasi pada pemimpin. Konsultasi ini merupakan bentuk timbal balik untuk menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan serta dapat memperoleh dukungan dari bawahan, sehingga mempermudah memberi instruksi ke bawah. Fungsi konsultatif dapat dikatakan bahwa anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, informasi, dan pendapat berkaitan dengan pekerjaan dan organisasi. Informasi atau hal-hal yang disampaikan oleh bawahan dapat berguna bagi perbaikan kepemimpinan seorang pemimpin yang berdampak pada keefektifitasan organisasi.

c. Fungsi Partisipasi

Pemimpin perlu membuat para bawahan untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan. Peran pemimpin tidak boleh mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain, sehingga pemimpin harus berada dalam fungsi pemimpin, bukan pelaksana. Artinya, fungsi partisipatif merupakan strategi untuk mengaktifkan organisasi dengan dua cara. Pertama, pengikutsertaan anggota organisasi sesuai posisi dan kewenangannya dalam berbagai kegiatan yang relevan. Kedua, ketersediaan pimpinan tertinggi dan pimpinan-pimpinan organisasi di bawah untuk berpartisipasi membantu anggota-anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah.

d. Fungsi Delegasi

Memberikan pelimpahan wewenang atau membuat keputusan kepada bawahan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan yang di atasnya. Seseorang yang diberikan wewenang tersebut harus memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Fungsi ini artinya dalam menggunakan kekuasaan dan tanggungjawab pemimpin harus mampu mengatur dan membuat aturan-aturan dan berupaya untuk menegakkan serta mematuhi aturan tersebut. Untuk mempengaruhi orang lain khususnya para bawahan agar mematuhi aturan, sang pemimpin lebih dahulu menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang disiplin.

e. Fungsi Pengendalian



Kepemimpinan yang efektif mampu mengatur bawahannya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Perwujudan dari fungsi ini sejalan dengan fungsi pemimpin sebagai pelayan dan melayani.

#### **4. Syarat Pemimpin**

Seorang pemimpin dinilai mampu menggerakkan pola dan arah kehidupan di dalam organisasinya. Setiap orang yang disebut pemimpin mempunyai pengaruh atas yang lain dan pengaruh ini akan tumbuh sesuai perjalanan waktu. Keberhasilan bertumbuh kembangnya organisasi atau kelompok banyak ditentukan dari praktek kepemimpinan seorang pemimpin tersebut. Berdasarkan pendapat Zainun (2001:89), syarat-syarat pemimpin antara lain:

- a. Memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk mampu memikirkan dan mencari cara penyelesaian setiap masalah yang ada dengan cara yang tepat dan bijaksana,
- b. Memiliki emosi yang stabil.
- c. Memiliki kepandaian dalam menghadapi manusia lain, yakni bawahan atau siapa saja yang berkaitan di dalam organisasi dan mampu membuat bawahan merasa nyaman.
- d. Memiliki keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan bawahan secara bijak dalam mewujudkan cita-cita organisasi serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab serta wewenang akan didelegasikan.
- e. Memiliki keterampilan yang diperlukan manajemen dalam menghadapi masalah.

Seorang pemimpin hendaknya harus mampu menggerakkan, mendorong, serta mendinamiskan kelompoknya sehingga kelompok yang dipimpinnya menjadi tubuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan anggota-anggotanya.

## 5. Tipe – Tipe Gaya Kepemimpinan

Seorang pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, watak, kepribadian dan tempramen tersendiri yang terdapat dalam dirinya dan membuatnya unik dari manusia yang lain disekitarnya, sehingga setiap tingkah laku dan gaya pemimpin selalu berbeda – beda. Gaya kepemimpinan adala suatu pola tingkah laku seseorang untuk memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut siagian (1999:75) tipe atau gaya kepemimpinan itu antara lain:

### a) Gaya Kepemimpinan Otokratik

Otokratik berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *kratos* yang berarti kekuasaan dan kekuatan. Kepemimpinan otokratik biasanya tunggal, egois dan cenderung menganut nilai-nilai organisasional yang berkisar pada kebenaran segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena sifat egoisme yang sangat besar, pemimpin seperti ini cenderung memperlakukan karyawan/ bawahannya dengan kurang menghargai harkat dan martabat manusia, lebih berorientasi pada pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan dan mutlak harus dipenuhi.

### b) Gaya Kepemimpinan Demokratik

Gaya kepemimpinan demokratik ini lebih menekankan pada partisipasi anggotanya dari pada bertindak dan menentukan keputusan sendiri. Peranannya selaku pemimpin dalam organisasi adalah sebagai koordinate dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi

sehingga bentuk kinerja yang dilakukan bersifat totalitas, dan terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya dengan penekanan pada rasa tanggungjawab pada diri sendiri dan pekerjaan yang tinggi serta adanya kerja sama yang baik.

c) Gaya Kepemimpinan Bebas/ *Laisses Faire*

Pada tipe gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin bersifat praktis karena dia membiarkan semua orang dalam kelompoknya berbuat kehendak mereka sendiri dan pemimpin tersebut tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggungjawab harus dilakukan sendiri oleh bawahannya. Keberadaan pemimpin ini hanya sebagai simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis dalam mengontrol anak buahnya dan tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja serta tidak mampu menciptakan suasana atau iklim kerja yang kondusif.

d) Gaya Kepemimpinan Paternalistik

Tipe gaya kepemimpinan ini banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, pada umumnya di masyarakat agraris. Popularitas pemimpin paternalistik di lingkungan masyarakat bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kuatnya ikatan primordial, *extended family system*, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, serta masih dimungkinkan hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.

e) Gaya Kepemimpinan Kharismatik

Kepemimpinan kharismatik ini memiliki karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu menarik pengikut yang sangat besar. Tegasnya pemimpin kharismatik ini merupakan pemimpin yang sangat dikagumi oleh pengikutnya, meskipun para pengikutnya tidak bisa menjelaskan secara jelas mengapa orang tersebut mereka kagumi.

## **E. Kepemimpinan Demokratik**

### **1. Pengertian Kepemimpinan Demokratik**

Dalam kepemimpinan, proses-proses kepemimpinan dan pola-pola hubungan antar pemimpin dan bawahan mempunyai ciri-ciri yang khas dalam setiap kelompoknya. Dimana ciri-ciri khas hubungan tersebut yaitu memberikan pengaruh sikap dan watak yang dibentuk oleh interaksi yang terjadi didalamnya. Dari pengaruh tersebut menimbulkan beberapa tipe pemimpin dan salah satunya adalah gaya kepemimpinan demokratik.

Sukarna (1990:44) menuliskan bahwa kepemimpinan demokratik adalah gaya kepemimpinan yang merakyat, yaitu kepemimpinan yang tidak membedakan asal keturunan, agama, ras, dan tingkat kehidupan kaya ataupun miskin. Gaya kepemimpinan demokratik menganggap bahwa semua orang yang berada disekelilingnya mempunyai kesamaan seperti kesamaan kebutuhan dasar hidup, kesamaan tujuan, dan sebagainya. sehingga, dengan demikian dalam konteks pemikiran gaya kepemimpinan demokratik bahwa seluruh bawahan ataupun orang-orang yang mengikutinya diperlakukan secara sama.

Kepemimpinan tipe demokratik adalah bentuk yang ideal dalam suatu organisasi, baik bagi kepentingan pemimpin maupun bagi bawahannya dalam

melaksanakan tugas sehari-hari. Kebijakan-kebijakan dan intruksi-intruksi yang diberikan pemimpin akan senantiasa dijalankan dengan semestinya serta penuh tanggungjawab oleh para pelaksana / bawahannya. Pemimpin akan selalu berusaha untuk mengadakan hubungan hubungan erat dengan masyarakat/bawahan melalui kesempatan-kesempatan informal seperti melakukan percakapan-percakapan santai tetapi serius.

Mengutip dari pendapat Soewardi (1980:11) mengenai kepemimpinan demokratik adalah:

“ Pemimpin demokratis senantiasa menanggapi kesan bawahannya dalam bekerja, baik mengenai pekerjaannya, situasi kerja dan lingkungannya, perlengkapan kerja , hubungan pergaulan , dan fasilitas- fasilitas yang tersedia dengan langkah sikap dan bahasa yang wajar terhadap bawahan/ masyarakat, sehingga dalam hal ini pemimpin harus mau terjun langsung ke lapangan.”

M. Karjadi (1983:12) juga menuliskan hal yang serupa tentang kepemimpinan demokratik yaitu:

“Dalam pelaksanaan tugas seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratik akan selalu mau menerima saran-saran dari masyarakat. Ia memberi kebebasan yang cukup kepada bawahannya dan kepercayaan yang cukup bahwa bawahannya akan berusaha sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.”

Berdasarkan pengertian kepemimpinan demokratik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan tipe demokratik lebih menekankan hubungan kemanusiaan dan selalu mengikutsertakan para bawahannya dalam menentukan suatu keputusan. Kepemimpinan tipe demokratik merupakan tipe yang paling ideal dan paling di dambakan oleh bawahannya dimana seorang pemimpin mau mendengar suara-suara, keluhan-keluhan dari masyarakat dan

memberikan mereka kesempatan untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka.

Segala informasi yang konstruktif sifatnya, disambut dengan baik, untuk perbaikan langkah-langkah selanjutnya dan yang sifatnya destruktif akan lebihdiperhatikan untuk dicari jalan pencegahannya. Dengan begitu, pemimpin demokratis ini senantiasa berusaha memupuk kekeluargaan dan persatuan, membangunkan semangat dan kegairahan bekerja pada anak buahnya.

## **2. Metode Kepemimpinan Tipe Demokratik**

Metode kepemimpinan adalah cara kerja dan bertinngkah laku seorang pemimpin dalam membimbing bawahan maupun pengikutnya untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Maka metode kepemimpinan bertujuan untuk membantu keberhasilan seorang pemimpin dalam melakukan tugas-tugasnya dan sekaligus dapat membantu memperbaiki tingkah laku serta kualitas kepemimpinannya.

Ordway Tead dalam bukunya "*The Art of Administration*" yang dikutip oleh Kartono (2002:53-57) mengemukakan metode kepemimpin demokratik adalah:

1. Memberi perintah  
Timbul dari situasi formal dan relasi kerja, sudah mencakup dalam tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok.
2. Memberi celaan dan pujian  
Celaan harus diberikan secara objektif dan bersifat subjektif, juga tidak disertakan emosi-emosi yang negatif. Celaan tersebut sebaiknya berupa teguran dan dilakukan secara rahasia, tidak secara terbuka didepan banyak orang. Celaan diberikan dengan maksud agar orang yang membuat kesalahan menyadari kekeliruannya dan bersedia memperbaiki perilakunya. Sebaliknya pujian diberikan sebab pribadi yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan baik dan mampu berprestasi. Pujian dilakukan secara terbuka agar dapat memberikan



semangat kegairahan kerja, dorongan emosional yang segar dan motivasi bagi anggota/karyawan yang lain.

3. Memupuk tingkah laku pribadi pemimpin yang benar  
Seorang pemimpin harus bersifat obyektif dan jujur. Ia harus menjauhkan diri dari rasa pilih kasih dan favoritisme, karena kesuksesan seorang pemimpin di ukur dari bagaimana perasaan pengikutnya saat bekerja. Apakah mereka diperlakukan secara sama, adil, dan jujur.
4. Peka terhadap saran-saran  
Sifat seorang pemimpin harus luwes dan terbuka, serta peka terhadap saran saran eksternal yang bersifat positif. Seorang pemimpin harus menghargai pendapat orang lain dan kemudian mengkombinasikannya dengan ide-idenya sendiri. Dengan begitu seorang pemimpin dapat meningkatkan inisiatif kelompok untuk lebih aktif lagi dalam bekerja.
5. Memperkuat rasa persatuan kelompok  
Untuk menghadapi macam-macam tanggapan dari luar dan kekompleksan pada situasi/jaman modern, perlu seorang pemimpin yang dapat menciptakan rasa kesatuan kelompoknya dengan loyalitas yang tinggi dan kekompakan yang utuh. Hal ini bisa meningkatkan moral kelompok dan semangat kelompok (*esprit de corps*).
6. Menciptakan disiplin diri dan disiplin kelompok.  
Setiap kelompok akan mengembangkan tatacara dan pola tingkah laku yang hanya berlaku dalam kelompok sendiri dan harus ditaati oleh seluruh anggota. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, uniformitas dan disiplin kelompok. Hal ini juga penting untuk menghindari perselisihan, konsekuensi, rasa permusuhan, kecerobohan, pemborosan, dan lain-lain. Disiplin kelompok dapat berhasil bila pemimpin bersifat arif dan bijaksana, memberikan teladan, disiplin, dan menerapkan seluruh prosedur dengan konsekuen.
7. Meredam kabar angin dan isu-isu yang tidak benar.  
Kesatuan dan efektivitas kelompok dapat digunjang oleh gangguan kabar-kabar angin yang tidak benar yang ditujukan pada perseorangan maupun pada organisasi secara keseluruhan. Semua itu ditujukan untuk mengacau tatanan kerja yang sudah ada. Maka seorang pemimpin berkewajiban untuk mengusut sampai tuntas dan memberi peringatan keras atau sanksi pada orang yang menyebarkan kabar tersebut. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mampu menetralkan situasi dengan jalan memberikan penerapan dan kebijakan baru yang akan diterapkan.

### 3. Pendekatan Gaya Kepemimpinan dalam Kepemimpinan Demokratik

Sukarna (1990:44) dalam bukunya “Kepemimpinan Dalam Administrasi”

juga menuliskan bahwa seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan



demokratik sering menggunakan pendekatan- pendekatan kepemimpinan sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya:

1. Pendekatan Kepemimpinan Partisipatif

Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan kepemimpinan yang selalu memberikan kesempatan kepada yang dipimpin untuk ikut secara aktif, baik mental, spiritual, fisik, maupun material dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pendekatan kepemimpinan partisipatif ini selalu memberikan kepercayaan terhadap bawahannya tanpa adanya keraguan yang dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri dari bawahannya. Sehingga, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin selalu bersifat korektif, yaitu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam rangka menuju kesempurnaan kinerja,

2. Pendekatan Kepemimpinan Persuasif

Pendekatan persuasif merupakan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan cara mempengaruhi orang-orang atau bawahan untuk bekerja secara efektif dan produktif dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam pendekatan ini, seorang pemimpin berusaha untuk mengubah perasaan, pikiran, dan kehendaknya atau dengan kata lain melalui ajakan dan bujukan. Sehingga dalam pendekatan ini, seorang pemimpin harus bersifat lemah lembut.

3. Pendekatan Kepemimpinan Inovatif

Seorang pemimpin dengan melakukan kepemimpinan inovatif akan selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-subjekusaha pembaharuan didalam segala bidang, baik produk-produk yang ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan manusia serta berusaha untuk menummuhkan hal-hal yang baru, yang belum pernah ada. Pendekatan kepemimpinan inovatif biasanya bersifat membaharui, yaitu untuk mengubah dengan cepat hal-hal yang dianggap kurang menguntungkan terhadap masyarakat dan kehidupan manusia.

4. Pendekatan Kepemimpinan Motivatif

Pendekatan kepemimpinan motivatif merupakan kepemimpinan yang mampu mengkomunikasikan seluruh ide-idenya, program-programnya, dan kebijakan-kebijakannya terhadap yang dipimpinnya sehingga mereka memahami, mengerti dan mau melaksanakan seluruh ide-ide, program-program, dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemimpin karena dianggap sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pemimpin dengan pendekatan kepemimpinan motivatif biasanya sangat pandai berbicara serta mampu mempengaruhi orang-orang dengan cepat dan mudah. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap bawahannya akan menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, dan rasa hormat yang ikhlas dari para bawahannya.

Tujuan dari dilakukannya pendekatan-pendekatan ini agar seluruh orang/masyarakat yang dipimpinnya dapat memperoleh kemajuan kemajuan dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu mengembangkan karier administrasi maupun karir sosial dalam lingkungan tempat kerjanya ataupun lingkungan yang lebih luas.

M. Karjadi (1983:11)dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan (Leadership) menuliskan bahwa Gaya kepemimpinan demokratik dipandang sebagai kebalikan dari pada cara kepemimpinan otokratis dan tidak senang terhadap gaya kepemimpinan otokratis karena hal ini dianggap akan dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif terhadap para bawahannya. Yang dimaksud dengan kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang perlakuannya bersifat diktatoris, memerintah anak buah dengan keras dan menganggap mereka sebagai alat belaka. Dalam kaitan inilah pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratik sangat senang apabila seluruh pengikutnya memberikan partisipasinya secara optimal terhadap tugas-tugas yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Meleong (2005:9) metode penelitian kualitatif Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala di dalam masyarakat (Koentjoroningrat, 1991:29). Sedangkan menurut Sugiono (2014:1-2) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lain.

##### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan merupakan suatu penetapan masalah-masalah dalam penelitian yang akan menjadi pusat dari penelitian tersebut. Fokus dari sebuah penelitian berfungsi untuk memberikan batasan studi dalam penelitian. Menurut (Moloeng, 2006:13) mengatakan bahwa “penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dengan fokus.” Adapun fokus dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratrik yang terdiri dari beberapa SKPD yakni:
  - a. Perencanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)
  - b. Penataan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang
  - c. Memberikan pembinaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM,
  - d. Pengawasan, pengendalian, dan penindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui gaya kepemimpin demokrati di Kota Bandung yang meliputi:
  - a. Faktor pendukung
  - b. Faktor penghambat

**a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, nantinya peneliti akan memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan tema. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Bandung yang sebelumnya dipenuhi dengan para PKL, namun setelah diterapkan Perda No 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dengan menggunakan pendekatan yang demokratis oleh

pemerintah Kota Bandung, khususnya Walikota Bandung, maka beberapa lokasi yang tergolong pada zona merah menjadi bebas dan bersih dari PKL tanpa ada kekerasan sedikitpun sehingga fenomena tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting dalam menentukan pengumpulan data, dan sumber data merupakan sumber dari mana data tersebut diperoleh peneliti dalam proses penelitiannya.

Jenis dan sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu:

##### **a. Jenis data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya dan berupa kata-kata atau tindakan dari orang-orang yang dipilih atau dijadikan sumber data primer dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer antara lain:

1. Dinas Tata Ruang
2. Satpol PP
3. Dinas koperasi dan UMKM
4. Beberapa orang PKL

##### **b. Jenis data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, surat kabar, internet, catatan, laporan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada di kantor pemerintahan kota Bandung dan juga sumber-sumber yang telah ada dan ini biasanya diperoleh

dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang dianggap menjelaskan realitas yang terjadi berkenaan dengan penataan PKL di kota Bandung

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Pasolong (2012:130) pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali penelitian eksploratif untuk pengujian hipotesa. Untuk mencapai memperoleh data tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

**1. Observasi**

Observasi adalah mengamati perilaku seseorang atau objek penelitian selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelapangan dan melihat lebih dekat ke objek penelitian dan observasi terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti, dan peneliti tersebut mengetahui aspek dari aktivitas yang diamati dan relevan dengan masalah serta tujuan dari peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melihat kondisi PKL di Kota Bandung, dan mengamati bagaimana kegiatan penataan dan alokasi PKL di Kota Bandung .

**2. Wawancara**



Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun terbuka, dan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi akan mampu mengorek kejujuran dan keobjektifan informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Wawancara dilakukan pada saat dan waktu yang tepat untuk menggali informasi sebanyak- banyaknya dan dapat mengungkap tentang keberadaan dan macam-macam PKL di kota Bandung , dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam penataan PKL.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah anggota SATGASUS penataan PKL (Satuan Tugas khusus) yang didalamnya antara lain: Dinas Koperasi, UKM, dan Industri Perdagangan, Bapelitbang, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, dan beberapa masyarakat kota Bandung.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah arsip, monografi, surat kabar, buku, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa jenis data umum yang berbentuk pendekatan pemerintah terhadap PKL dan data tentang peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Pemkot Kota Bandung. Selain itu, dokumentasi lain yang mungkin juga diperlukan adalah foto-foto, berita di koran, dan lain sebagainya.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, hal ini sesuai dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data tergantung dari peneliti sendiri dengan segenap aktifitasnya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan. Peneliti sebagai instrumen utama (*instrumen guide*) dengan menggunakan panca indera untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan melalui observasi dan melakukan wawancara.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), didalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan penelitian dalam rangka mencari data yang diinginkan. Pedoman wawancara yaitu berupa serangkaian pernyataan yang aka ditanyakan pada responden, yang mana dalam hal ini digunakan sebagai petunjuk saat melakukan wawancara.
3. Catatan lapangan (*field note*), catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data refleksi data dalam penelitian kualitatif.
4. Perangkat penunjang (*tape, recorder dan camera*), hal ini diperlukan untuk membantu dokumentasi penelitian baik berupa visual maupun no visual.

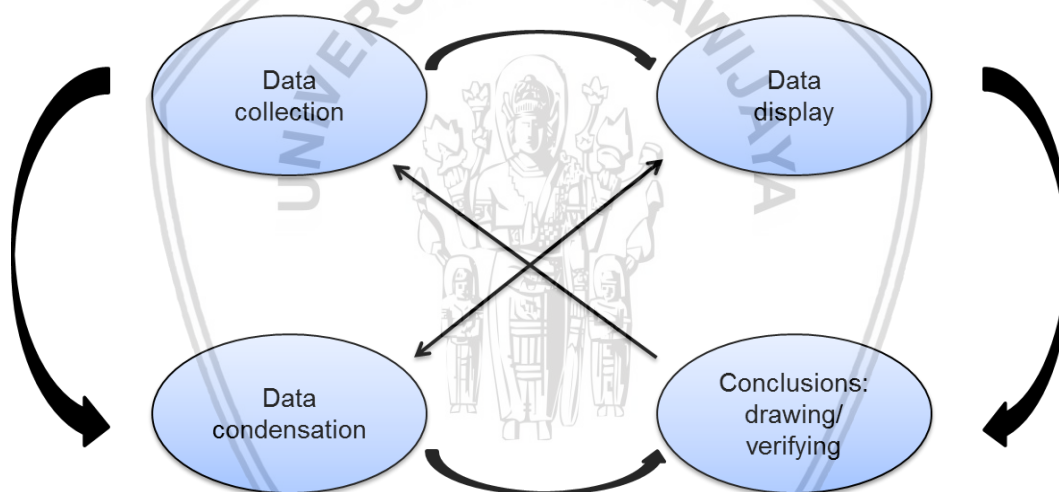
### E. Analisa Data

Untuk dapat menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif, sesuai dengan apa tujuan dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pertanyaan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacubeberapa tahapan yang terdiri dari :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasa’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
3. Penyajian data, yaitu kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih, dan kemudian adanya penarikan kesimpulan. Dengan begitu kita akan lebih memahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan memahami data data yang disajikan.
4. Menarik Kesimpulan atau Validasi, akhir dari kegiatan analisi yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini mencakup penulisan kembali ide-ide dari penganalisisan data yang telah didapat. Atau dapat

dikatakan sebagai suatu tinjauan ulang dari data lapangan, serta menyalin temuan menarik dari seperangkat data atau informasi yang telah ditemukan di lapangan.

Komponen-komponen di atas merupakan proses siklus yang saling interaktif. Dapat dilihat dari gambar di bawah, bahwa peneliti harus siap bergerak di antara empat sudut selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik dari reduksi data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yaitu:



**Gambar 3.1. Model Analisa data Interaktif**

Sumber: Miles dan Huberman dan Saldana  
(2014:14)

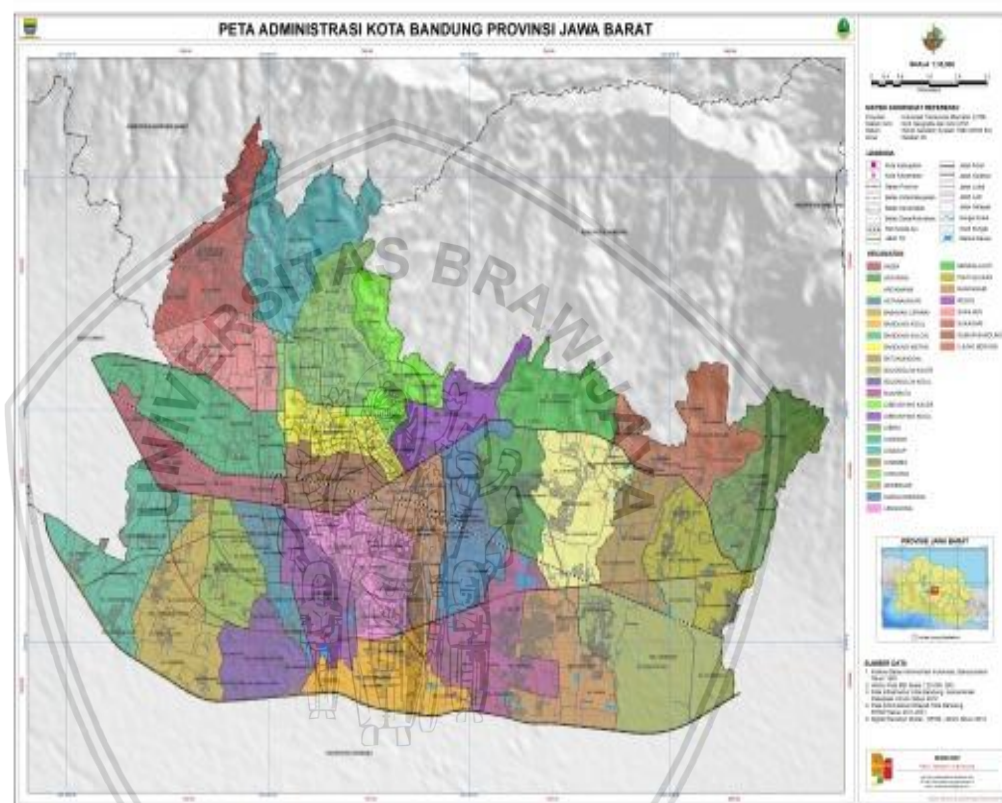


## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Bandung



**Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Bandung**

Sumber: peta tematik indonesia-word press.com

##### a. Sejarah Singkat Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota ini dibangun dengan senggang waktu yang sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi dengan bupati pertama



yaitu Tumenggung Wiraangunangun yang memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681. Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang bernama Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Pada tahun 1794 Kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6 yakni R.A Wiranatakusumah II dengan periode jabatan pada tahun 1794-1829 yang dijuluki dengan nama “Dalem Kaum I”. Pada saat yang bersamaan itu pula kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda dengan gubernur jenderal pertama yaitu Herman Willem Daendels (1808-1811).

Daendels membangun Jalan raya Pos pada masa awal jabatannya di tahun 1808 (*Groot Postweg*) dari Anyer di ujung barat Jawa barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur (kira-kira 100 km) yang bertujuan untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa. Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlerbar jalan yang sudah ada. Jalan Raya Pos tersebut antara lain Jalan Raya Sudirman, Jalan Raya Asia Afrika, jalan raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Pada tanggal 25 Mei 1810, Daendels menurunkan surat keputusan yang meminta ibukota Kabupaten bandung dipindahkan mendekati Jalan raya Pos yang telah dibangun. Namun Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung ke tempat yang lebih strategis karena Krapyak merupakan daerah yang tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan dan terletak disisi selatan daerah Bandung, serta sering dilanda banjir bila musim hujan. Lahan yang dipilih



adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi barat Sungai Cikapundung tepat di tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun.

Pada tahun 1808/awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari krapyak mendekati lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Pada awalnya bupati tinggal di Cikalintu, kemudian pindah ke Belubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebun Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Sehingga Kota Bandung dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas Prakarsa Bupati Kota Bandung bahkan pembangunan kota bandung langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810 dan tanggal inilah yang menjadi peringatan hari lahir Kota Bandung.

#### **b. Kondisi Geografis Kota Bandung**

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107°-43° Bintang Timur dan 6°00-6°20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan Ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir kearah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi

yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung merupakan lapisan alluvial dari letusan gunung tangkuban perahu. Jenis materian di bagian utara dan pusat kota merupakan jenis andosol, dan bagian selatan serta timur tersebar jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitar, sehingga membentuk cuaca yang sejuk dan lembab dengan temperature rata-rata 25°C. Adapun batas-batas administratif Kota bandung, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kota Bandung adalah 167,31 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Gedebage dengan luas 9,58km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Astanaanyar yaitu dengan luas terkecil wilayah 2,89km<sup>2</sup>. Secara rinci tentang jumlah desa dan kelurahan di masing-masing kecamatan serta luas wilayahnya sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 1

## Pembagian Wilayah Administrasi dan Kuas Tiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		RW	RT	Kelurahan	
1	Bandung Kulon	74	453	8	6,46
2	Babakan Ciparay	57	365	6	7,45
3	Bojongloa Kaler	47	395	5	3,03
4	Bojongloa Kidul	44	261	6	6,26
5	Astanaanyar	47	304	6	2,89
6	Regol	60	371	7	4,30
7	Lengkong	65	431	7	5,90
8	Bandung Kidul	34	194	4	6,06
9	Buah Batu	55	371	4	7,93
10	Ranca Sari	52	341	4	7,33
11	Gede Bage	41	206	4	9,58
12	Cibiru	53	282	4	6,32
13	Panyileukan	37	184	4	5,10
14	Ujung Berung	59	312	5	6,40
15	Cinambo	25	101	4	3,68
16	Arcamanik	51	267	4	5,87
17	Antapani	61	335	4	3,79
18	Mandalajati	52	299	4	6,67
19	Kiaracondong	85	593	6	6,12
20	Batununggal	83	554	8	5,03
21	Sumur Bandung	37	231	4	3,4
22	Andir	54	384	6	3,71
23	Cicendo	56	413	6	6,86
24	Bandung Wetan	36	197	3	3,39
25	Cibeunying Kidul	87	562	6	5,25
26	Cibeunying kaler	46	290	4	4,50
27	Coblong	75	462	6	7,35
28	Sukajadi	49	331	5	4,30
29	Sukasari	32	220	4	6,27
30	Cidadap	29	175	3	6,11
<b>Total</b>		<b>1583</b>	<b>9884</b>	<b>151</b>	<b>167,31</b>

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2017

### c. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang akan dituju pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan amanat publik, dimana visi Kota Bandung yaitu ingin mewujudkan kota bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Penjabaran visi diatas:

- a. Unggul: mewujudkan Kota Bandung menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
- b. Nyaman: terciptanya kondisi suatu dengan kualitas lingkungan yang terpelihara dan kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukung yang responsive sehingga nyaman untuk ditinggali.
- c. Sejahtera: meningkatkan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan Wakil Tuhan di bumi.

#### 2. Misi

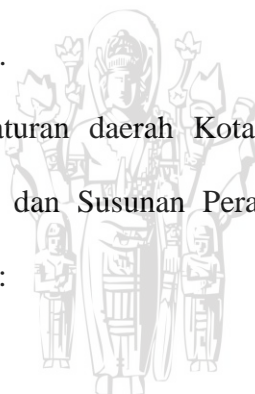
- a. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

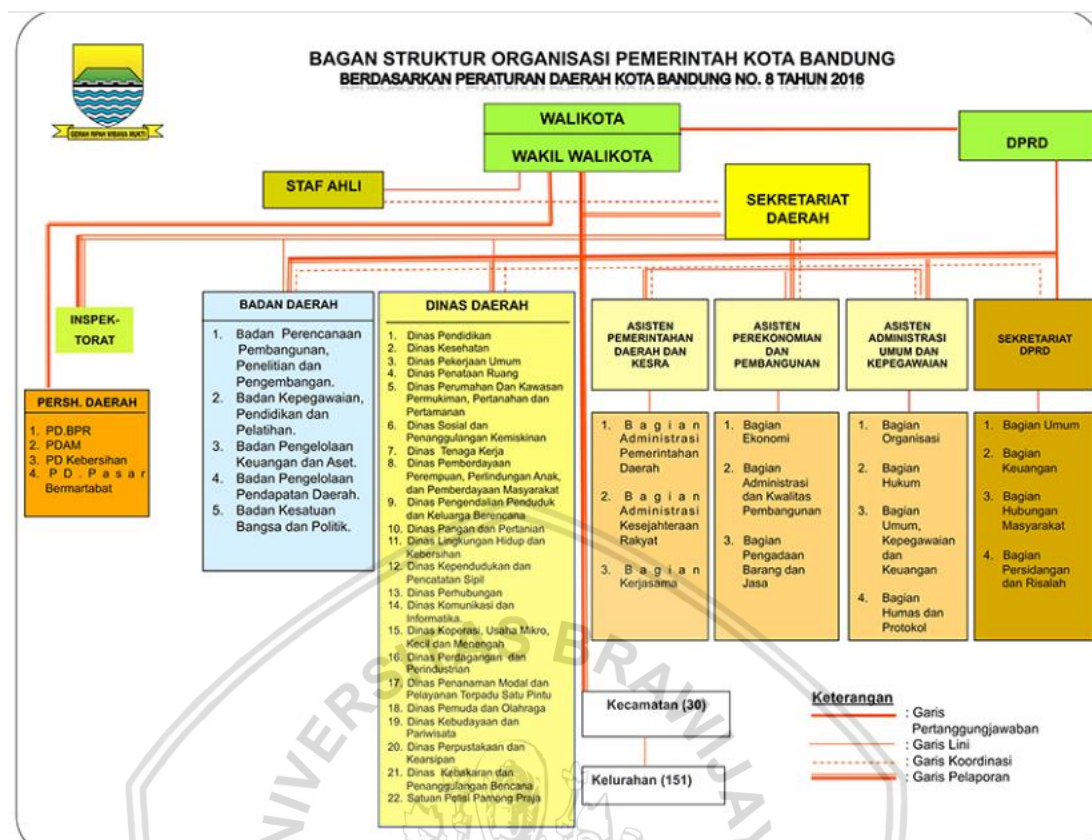
- c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya satging.
- d. Membangun perekonomian yang kokoh , maju dan berkeadilan.

#### **d. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung**

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi karena akan terlihat jelas hubungan antara kedudukan, fungsi dan tugas masing-masing tiap-tiap bagian. Struktur organisasi juga berfungsi untuk memperjelas tugas setiap bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab karena pegawai sudah mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung no 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:





**Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung**

**Sumber: Portal Bandung.go.id**

## 2. Gambaran Umum Situs Penelitian

### a. Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, maka Dinas KUKM Kota Bandung mempunyai tugas pokok



mulaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, maka Dinas KUMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro. Kecil dan Menengah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Kecil dan Menengah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi sekretariat, Bidang-Bidang dan UPT Dinas KUMKM Kota Bandung

Secara organisatoris dinas KUMKM Kota Bandung terbagi dalam Organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-Bidang, dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.



- 2) Bidang kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penilaian, pengawasan, dan penindakan koperasi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan koperasi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan koperasi;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan koperasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan koperasi;

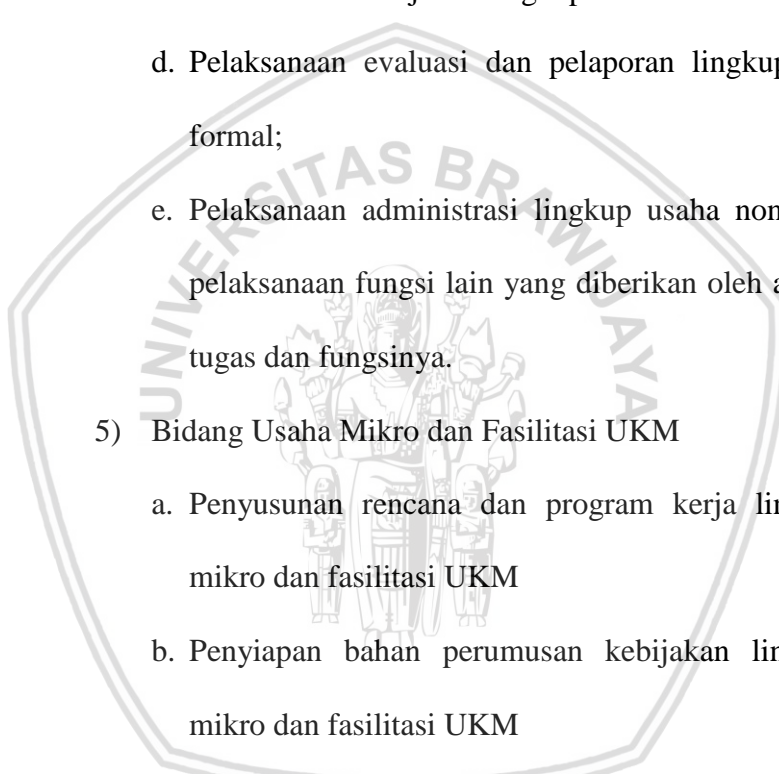
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Usaha Non Formal

- a. Penyusunan rencana dan program kerja usaha non formal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup usaha non formal;
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup usaha non formal;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha non formal;
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup usaha non formal dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

5) Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM
- c. Pelaksanaan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup usaha mikro dan fasilitas UKM



f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UKM (UPT balatkop dan UKM)

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah;

b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

**b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG)**

Bappelitbang merupakan badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Bappelitbang mempunyai fungsi yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintah, penelitian pengembangan dan statistic serta penanaman modal;

- e. Pelaksanaan pelayanan teknis badan administratif;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung**

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang, sebagian bidang pekerjaan umum dan sebagian bidang perumahan. Uraian tugas diatas di tetapkan dalam perwal Kota Bandung no 743 tahun 2014 dan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas diatas Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan pemukiman;
- b. Penyeenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman meliputi survey dan pemetaan dan perencanaan dan pengendalian, perumahan dan pemukiman, dokumentasi dan pelayanan;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung**

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP juga

mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksana Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan urusannya, Satpol PP berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas perda.

## **B. Penyajian Data PKL**

### **1. Pembagian zonanisasi dan Jumlah PKL Kota Bandung**

Peraturan pembagian Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditetapkan dalam Perwal Bandung No: 888 Tahun 2012 di bedakan dalam 3 zona yaitu zona merah ( lokasi yang sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang), lokasi yang termasuk dalam zona merah ini antara lain:

- a. lokasi 7 titik yakni: Sekitar Alun-Alun Mesjid raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, jalan dewi sartika, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Merdeka.
- b. Sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Lokasi sekolah;
- d. Lokasi dan jalan tertentu;
- e. Setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
- f. Lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (CFD);
- g. Kawasan lindung;.

Zona yang kedua merupakan zona yang dikategorikan sebagai zona kuning dimana para PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB untuk kategori pasar tumpah dan untuk pedagang kuliner adalah pukul 17.00 hingga 04.00 WIB. Zona yang ketiga merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Berdasarkan pendataan Bapelitbang Kota Bandung pada tahun 2015 jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 22.359 orang yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Lokasi persebaran PKL yang terbesar terdapat di 8 kecamatan yakni: Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Andir, kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan babakan Ciparay, dan Kecamatan Istana Anyar.

**TABEL 2****Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Sukasari	354
2	Sukajadi	1966
3	Cidadap	88
4	Coblong	2744
5	Cibeunying Kaler	159
6	Cibeunying Kidul	1105
7	Cinambo	71
8	Cicendo	740
9	Andir	1457
10	Bandung Wetan	991
11	Bandung Kulon	230
12	Sumur Bandung	639
13	Kiara Condong	1119
14	Batununggal	576
15	Mandalajati	62
16	Lengkong	1113
17	Regol	3263
18	Babakan Ciparay	464
19	Bojongloa Kidul	237
20	Bojongloa Kaler	290
21	Arcamanik	428
22	Ujungberung	403
23	Buah Batu	720
24	Bandung Kidul	122
25	Astana Anyar	1800
26	Antapani	885
27	Cibiru	78
28	Rancasari	167
29	Gedebage	12
30	Panyeleukan	76
<b>Total</b>		<b>22359</b>

Sumber : pengelola data Bapelitbang 2015

## 2. Jumlah dan Jenis PKL di Kota Bandung

Kuliner merupakan jenis dagangan yang dipilih sebagai komoditi utama oleh sebagian besar PKL, dimana jumlahnya mencapai 12.697 PKL (56,79%).



Posisi kedua merupakan Jenis dagangan lainnya diantaranya buah-buahan, sayur mayur, alat elektronik, peralatan otomotif, tanaman hias dan lain-lain dengan jumlah sebanyak 2.388 (10,68%). Selain itu ada juga PKL yang memperdagangkan lebih dari satu jenis dagangan dengan jumlah sebanyak 1.265 PKL. Seperti yang tertera pada tabel 3.

**TABEL 3**  
**Jumlah dan Jenis PKL di Kota Bandung**

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Persen (%)
1	Fashion	4367	19.53
2	Kuliner	12697	56.79
3	Peralatan Rumah Tangga	532	2.38
4	Peralatan Elektronik	554	2.48
5	Kerajinan Tangan	556	2.49
6	Lainnya	2388	10.68
7	>1 Alternatif	1265	5.66
<b>Total</b>		<b>22359</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: Pengolahan data Bappelitbang 2015**

### **3. Asal (KTP) PKL di Kota Bandung**

Kota Bandung merupakan ibukota Jawa Barat yang memiliki banyak potensi khususnya di bidang pariwisata. Hal ini menyebabkan Kota Bandung menjadi salah satu kota tujuan bagi para pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kota Bandung juga menjadi pusat kegiatan atau aktivitas bagi seluruh penduduk setempat maupun penduduk di daerah sekitarnya. Aktivitas yang dilakukan sebagian besar masyarakat pun bermacam-macam, namun sebagian besar aktivitas dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung adalah bergelut di bidang sektor perdagangan baik formal maupun non formal seperti PKL.

Berdasarkan alamat PKL yang tercantum pada KTP melalui pendataan yang dilakukan Bappeda (tabel 4), sebagian besar PKL merupakan penduduk kota Bandung yaitu sebanyak 11.237 PKL atau setara dengan 50,26%. Namun demikian, PKL yang berasal dari luar Kota Bandung pun memiliki jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 11.122 PKL atau setara dengan 49,74% dari 100% penduduk PKL Kota Bandung. Dapat disimpulkan bahwa PKL yang berasal dari luar Kota Bandung hampir mencapai 50% atau setengah dari penduduk PKL di kota Bandung.

**TABEL 4**  
**Asal (KTP) PKL Kota Bandung**

No	Asal KTP	Jumlah	Persen (%)
1	Penduduk Asli Kota Bandung	11237	50.26
2	Penduduk Luar Kota Bandung	11122	49.74
<b>Total</b>		<b>22359</b>	<b>100.00</b>

sumber: Pengolahan Data Bappelitbang 2015

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan para PKL yang berada di Kota Bandung sangat bervariasi mulai dari yang tidak bersekolah bahkan sampai yang bersekolah ke jenjang S2, hal ini dapat dilihat pada table 5.

**TABEL 5**  
**Tingkat Pendidikan PKL di Kota Bandung**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	Tidak Pernah Sekolah	595	2.66
2	SD	6530	29.21
3	SLTP	7724	34.55
4	SLTA	7073	31.63

5	Diploma	239	1.07
6	S1	197	0.88
7	S2	1	0.00
<b>Total</b>		<b>22359</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: Pengelolaan Data Bappelitbang 2015**

Dilihat dari data di atas, bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Bandung rata-rata berpendidikan rendah dimana jumlah tingkat pendidikan PKL terbanyak di Kota Bandung yaitu tamatan SLTP sebanyak 7.724 dan SLTA sebanyak 7.073 PKL. Pendidikan yang rendah tersebut mendorong mereka untuk menjadi PKL, karena menjadi PKL adalah suatu pilihan agar mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Disamping itu, menjadi seorang PKL juga tidak membutuhkan modal yang besar.

### **C. Penyajian Data Fokus Penelitian**

#### **1. Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui gaya Kepemimpinan Demokratrik.**

Pemasalahan PKL merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Harus diakui bahwa keberadaan PKL di suatu daerah dapat menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat di daerah. Sehingga dalam mengatasi masalah keberadaan PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menuangkannya kedalam Perda No 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib untuk di taati oleh segenap masyarakat

yang berada di wilayah Kota Bandung khususnya para PKL itu sendiri. Perda No 04 tahun 2011 ini juga mengatur kelembagaan yang mana berfungsi untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL. Dalam Perda ini, Walikota Bandung membentuk SATGASUS PKL yang merupakan suatu Satuan Tugas Khusus yang dibentuk dari beberapa SKPD yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penataan dan Pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Pembentukan Satgasus penataan PKL ini diperjelas lagi dalam Keputusan Walikota Bandung No:511.23/kep.051-Dis KUMKM/2017 tentang Satuan Tugas Khusus dalam Penertiban PKL di Kota Bandung. Walikota membentuk Satgasus PKL dengan bertujuan untuk menertibkan PKL, menata dan membina PKL di Kota Bandung serta demi tercapainya keinginan menciptakan Kota Bandung yang lebih Baik. Walikota Bandung membentuk Tim Satgasus dan memberikan delegasi dan tanggung jawab kepada:

- Ketua : Wakil Walikota Bandung
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Wakil Ketua II : Asisten pemerintahan dan Kestra pada sekretariat Daerah Kota Bandung
- Wakil Ketua III: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

- Anggota : Bappelitbang, Dinas tata Ruang, Dinas KUMKM, dan Sarpol PP.

Perda No 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung ini bermanfaat untuk melihat dan mengelola Keberadaan PKL di Kota Bandung . Keberadaan PKL merupakan potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial PKL memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Keberadaan PKL dapat membantu meningkatkan perekonomian dikalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Dalam Pemanfaatan dan pengelolaan potensi PKL untuk meningkatkan pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah memerlukan adanya ketegasan pemimpin yang tidak hanya menetapkan peraturan penataan PKL dan mengimplementasikannya, namun memerlukan seorang pemimpin yang dapat memberikan solusi yang baik dan bermanfaat bagi PKL serta dapat memotivasi para PKL agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan layaknya pendekatan gaya kepemimpinan demokratik. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati tetapi hal yang dapat disimpulkan karena adanya suatu perilaku yang tampak. Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut dengan motivasi. Agar pemimpin dapat memotivasi bawahannya atau masyarakatnya dengan mudah, maka diperlukan kemampuan untuk menunjukkan “makna” dari kegiatan yang akan

dilaksanakan dan dapat menunjukkan “keuntungan” yang dapat diraih dari kegiatan tersebut.

Berkenaan dengan itu Bapak Ahmad Fauzan sebagai ketua Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Kantor Satpol PP Kota Bandung mengungkapkan bahwa:

“bentuk motivasi awal yang diberikan oleh Pak Ridwan kamil kepada para PKL Kota Bandung yaitu dengan mendorong dan menggerakkan para PKL untuk ikut berpartisipasi dalam proses mengatasi masalah penataan PKL dengan tujuan membentuk Kota Bandung yang indah dan rapi. Hal yang dapat dilakukan para PKL untuk membantu proses penataan PKL yaitu dengan mereka mau ditata dan mau diatur tanpa ada perlawanan itu sudah sangat membantu proses penataan PKL ini mbak (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Lebih lanjut disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzan selaku ketua Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Kantor Satpol PP Kota Bandung menambahkan bahwa:

“bentuk motivasi lain yang diberikan Pemimpin Kota Bandung terhadap para PKL dalam proses penataan PKL ini yaitu beliau memberikan sebuah janji yang konsisten terhadap para PKL , mereka dijanjikan dan diyakinkan bahwa jika mereka sudah direlokasi nanti, mereka akan direlokasi ketempat yang lebih baik lagi dan mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Setelah mereka di relokasi mereka akan dibina dan dibimbing agar mereka lebih maju lagi. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Penjabaran makna dari tujuan yang ingin dicapai dan menunjukkan keuntungan yang dapat PKL peroleh dalam strategi penataan PKL ini merupakan hal utama yang dilakukan oleh Pemerintah Bandung dalam menata dan membina PKL. Hal tersebut ditegaskan oleh Pemerintah Bandung bahwa jika para PKL mengetahui tujuan dari penataan dan



mengetahui ada campur tangan pemerintah terhadap mereka , maka secara otomatis akan timbul suatu pemicu untuk melakukan dan mencapainya. Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam strategi penataan PKL ini yaitu untuk mensejahterakan para PKL, membuat para PKL menjadi lebih baik dan lebih maju, dan membuat Kota Bandung menjadi kota yang bersih dan rapi dari segi infrastruktur serta sarana dan prasarana Kota.

**1) Perencanaan dan Pendataan Yang Dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)**

Perencanaan strategi penataan PKL dan pendataan yang dilakukan terhadap PKL merupakan suatu strategi pertama yang akan dijalankan oleh Satgas PKL dalam proses penataan PKL di Kota Bandung. Bidang perencanaan penataan PKL diurus oleh Bappelitbang Kota Bandung yang bertugas mengumpulkan data-data terkait PKL, menyusun rencana Penataan dan Pembinaan PKL, melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan PKL, dan merumuskan rencana lebih rinci dalam penempatan PKL pada zona kuning dan zona hijau bagi PKL. Perencanaan dan pendataan PKL merupakan suatu langkah untuk menentukan arah serta tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Untuk menentukan sebuah perencanaan yang baik dan terarah maka diperlukan adanya pendataan yang kompleks dan transparan. Seperti halnya yang telah di sampaikan oleh Bapak Irvan selaku Staff di Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang:



“Berdasarkan Perda No 04 tahun 2011 dan disempurnakan lagi dalam Perwal No 888 Tahun 2012, Satgasus ini dibentuk sesuai dengan tupoksinya masing-masing dimana penanganan PKL ini bukan hanya di tangani oleh 1 dinas melainkan beberapa dinas. Contohnya untuk melakukan penataan PKL disuatu titik, kita perlu sebuah perencanaan dimana hal ini di urus oleh salah satu dinas di pemerintahan Kota Bandung yakni Bappelitbang Kota Bandung. Dalam melakukan perencanaan, maka perlu ada pendataan PKL di Kota Bandung. Disini Bappelitbang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pendataan. Bappelitbang bekerja sama dengan kewilayahan untuk melakukan pendataan *by name by address* (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung).”

Pendataan yang dilakukan oleh kewilayahan bertujuan untuk menentukan apakah lokasi para pedagang tersebut berada di zona merah, kuning, atau hijau. Pertama, apabila para PKL tersebut berada di zona merah maka mereka harus di relokasi. Kedua, apa bila para PKL berada di zona kuning maka mereka harus di tata dan di tertibkan. Ketiga, apabila para PKL berberada di zona hijau maka mereka harus di tata agar lebih rapih. Bapak Irvan selaku staff di bidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang menambahkan bahwa:

“pendataan yang dilakukan oleh kewilayahan ini bertujuan untuk membantu Bappelitbang dalam menentukan perencanaan PKL di daerah mana saja yang harus di relokasi, ditata, dan dibina. Jika mereka yang berada di zona merah, mau tidak mau mereka harus di relokasi ke zona hijau yang merupakan zona bebas PKL dengan melakukan pendekatan *win-win solution* (tidak merugikan sebelah pihak) . Dimana sebisa mungkin lokasi para PKL yang di relokasi tidak jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya agar tidak menyusahkan mereka (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”

Pendataan yang di lakukan oleh kewilayahan dan bappelitbang tersebut merupakan bahan yang akan dijadikan sebagai sebuah perencanaan penataan PKL yang terarah dan terencana. Pemerintah Kota

Bandung akan mengambil keputusan bersama dengan Bappelitbang dan anggota satgasus lainnya untuk menentukan PKL mana saja yang akan di relokasi dan di tata sesuai dengan data yang di dapat dari kewilayahan. Peran Walikota Bandung dalam pengambilan keputusan terkait penataan PKL Kota Bandung biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Satgasus PKL Kota Bandung dengan melakukan pemilihan terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Alternatif yang tersedia muncul dari adanya Pendataan terkait PKL mana saja yang harus di relokasi dan kemana akan di relokasi serta pendataan *by name by address* yang dilakukan oleh kewilayahan dan Bappelitbang dengan tujuan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Pedagang) bagi PKL yang berkependudukan di Kota Bandung dan berhak untuk menikmati fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah terkait penataan PKL. Dengan adanya informasi yang baik dan lengkap dari kewilayahan dan Bappelitbang akan lebih mempermudah Walikota Bandung dalam mengambil keputusan dan keputusan yang dibuat akan lebih mufakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Irvan selaku staff di bidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang yang menjelaskan bahwa:

“setelah bappelitbang mengumpulkan data terkait PKL, maka semua data itu akan dibawa ke sidang Satgasus dan akan di kunci mbak, dalam setiap pengambilan keputusan, pak Walikota (Ridwan Kamil) akan selalu mempertimbangkan aspek kepentingan dari berbagai pihak, baik itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah, bahkan juga kebutuhan PKL itu sendiri.

Setelah semuanya beres, salah satu saringan yang di utamakan adalah pemilik KTP (Kartu Tanda Pedagang) Bandung karena kita di sini bertujuan untuk memprioritaskan penduduk Kota Bandung dan mengubah usaha beberapa PKL yang berkependudukan Kota Bandung menjadi usaha formal (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”.

Bapak Ahmad Fauzan sebagai Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Satpol PP Kota Bandung juga menambahkan:

“KTP ini akan di cetak oleh dinas KUMKM berdasarkan data yang diperoleh dari Bappelitbang, dan kegunaan dari KTP ini bertujuan agar komunikasi bisa berjalan lancar mbak. Ada komunikasi 2 arah antara Pemerintah pengurus PKL dan PKLnya itu sendiri (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan penataan PKL dan Pendataan yang dilakukan terhadap PKL merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Satgasus dalam proses pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung. Bappelitbang merupakan badan yang berada di posisi tahapan pertama dalam proses penataan PKL, dimana Bappelitbang berperan sebagai badan yang bertugas dalam melakukan pendataan dan perencanaan proses penataan PKL Kota Bandung agar penataan PKL di Kota Bandung lebih terarah dan terencana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dipahami bahwa perencanaan dan pendataan terkait penataan PKL yang dilaksanakan oleh Bappelitbang merupakan dasar untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi penataan PKL di Kota Bandung. Walikota selalu

melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan agar hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara anggota penataan PKL dan PKL itu sendiri. Hal ini bertujuan agar dalam pengambilan keputusan tersebut tidak didasari pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memanfaatkannya.

Keputusan yang diambil oleh Walikota akan di laksanakan dan diterapkan langsung dimana dalam melaksanakan perencanaan dan pendataan terkait penataan PKL, Bappelitbang bekerja sama dengan Kewilayahan (Kecamatan/Kelurahan) dalam melakukan pendataan. Kewilayahan akan mendata PKL yang berada di daerahnya melalui pendataan nama dan alamat. Tujuan dari pendataan ini untuk menentukan PKL mana saja yang berhak untuk di relokasi, di tata, dan diberi KTP (Kartu Tanda Pedagang) yang nantinya akan di cetak oleh Dinas KUMKM. Tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pelaksanaan pendataan terhadap PKL Kota Bandung tersebut yaitu untuk memprioritaskan penduduk Kota Bandung dan mengurangi kapasitas PKL yang berkependudukan Kota Bandung dari non formal menjadi formal.

## **2) Penataan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang**

Kemunculan PKL di suatu kota dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan Kota namun kemunculan PKL juga memiliki arti penting yang positif bagi pemerintahan. Sehingga untuk mewujudkan harapan Pemerintah Kota yang bersih dan rapi, maka perlu adanya penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang

merupakan dinas yang berperan dalam bidang penataan di Satgasus PKL Kota Bandung. Tahapan kedua setelah pendataan dan perencanaan penataan PKL di Kota Bandung yaitu tahapan penataan, dimana bidang penataan ini memiliki tugas sesuai dengan yang ditetapkan di PERWAL Kota Bandung No 888 tahun 2012 pasal 6 ayat 3 menjelaskan:

“bidang penataan mempunyai tugas membantu Satgasus dalam melaksanakan penempatan dan penataan PKL zona hijau dan/atau di zona merah, melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi menjadikan objek wisata belanja, membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah tertentu.”

Hal serupa disampaikan oleh Pak Irvan selaku staff di Bidang Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang yang menjelaskan:

“kami selaku bidang penataan di Satgasus PKL Kota Bandung mempunyai tugas untuk menata PKL yang telah di data dari Bappelitbang, kan ada 3 zona yang telah ditetapkan dalam dalam Perda No 04 Tahun 2011. Nah kita di sini bertugas untuk mendesain bagaimana bentuk dari tempat yang akan dijadikan sebagai lapak para PKL yang akan di relokasi. Kami bekerjasama dengan Kewilayahan, dimana kewilayahan akan mengkoordinir para PKL yang akan di relokasi. Mereka akan membantu kami untuk menentukan pkL mana yang akan direlokasi karena tugas dari kewilayahan adalah menginformasikan data PKL (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung).”

Kegiatan penataan PKL ini memiliki kesulitan tersendiri bagi pemerintah Kota Bandung. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan PKL ini sendiri juga dipengaruhi dari berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika utama dalam penataan PKL ini adalah jumlah mereka yang semakin banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. PKL tidak mungkin dihilangkan dari berbagai kegiatan diruang publik. Hanya saja Pemerintah Kota Bandung lebih



memperhatikan para PKL yang berkependudukan di Kota Bandung di bandingkan para PKL yang datang dari luar daerah dan melakukan aktivitas perdagangan dikota Bandung. Agar pemimpin dapat memotivasi bawahannya atau masyarakatnya dengan mudah ,maka diperlukan kemampuan untuk menunjukkan “makna” dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat menunjukkan “keuntungan” yang dapat diraih dari kegiatan tersebut.

Hal ini diperjelas oleh Pak Irvan selaku staff di Bidang Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang yang menjelaskan:

“Kami hanya bertugas mendesain tempat PKL dan jumlah lapak PKL sesuai dengan luas lokasi yang tersedia. Kami tidak mau memaksakan berapa jumlah PKL dari lokasi yang lama dan mendesainnya ke lokasi yang baru. Tidak boleh di paksakan, kalo dipaksakan maka bangunannya tidak berfungsi dengan baik. Selain itu Pemimpin Kota Bandung juga memberikan motivasi dengan mendorong dan menggerakkan para PKL untuk mau ditata dengan baik. disini kita memakai Kartu Tanda Pedagang PKL untuk menyaring para PKL yang akan di relokasi, karena jumlah pedagang yang berada di Kota Bandung itu tidak semua penduduk Kota bandung, setengah dari mereka itu berasal dari luar Bandung mbak.(wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung).”



**Gambar 4.3: Penataan PKL Cihampelas**

Gambar 4.3 menunjukkan dimana dulunya PKL berjualan di pinggir jalan dan terkadang mengakibatkan kemacetan. Namun setelah adanya penataan, para PKL direlokasi ke atas jalan. Disini Penataan Ruang mendesain relokasi PKL menjadi *skywalk* agar tidak mengganggu pengguna jalan, dan membuatnya semenarik mungkin sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung dan menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat wisata di Kota Bandung.



**Gambar 4.4: Relokasi PKL Balonggede**

gambar 2 merupakan hasil penataan relokasi PKL yang berada di Balonggede. Lokasi ini merupakan zona hijau dimana PKL dapat bebas berjualan. Namun permasalahan sebelumnya adalah lokasi berdagang para PKL tidak teratur dan mengakibatkan persempitan jalan. Sehingga



Dinas Tata Ruang berusaha mendesain lokasi baru semaksimal mungkin dan semenarik mungkin agar dapat dijadikan tempat wisata kuliner yang bersih dan rapih.

Ibu Suparti yang merupakan salah satu Pedagang di Balonggede menungkapkan bahwa

“lokasi ini dulunya sangat tidak teratur dan tidak rapih, namun saat ini lokasinya lebih dirapikan dan dibuat menjadi satu baris agar tidak mengganggu jalan. Setiap pedagang di beri satu petak sehingga ada kepemilikan mbak. Kalau dulu itu tempanya tidak menetap, terkadang yang berdagang suka berganti ganti. Namun sekarang jauh lebih nyaman sih mbak (wawancara pada tanggal 23 februari 2018 di Balonggede)”

Ibu Ani yang merupakan salah satu PKL di Alun-Alun Kota Bandung menambahkan:

“pada saat kepemimpinan Walikota sebelumnya, pkL yang berada di alun-alun Kota Bandung sudah di relokasi ke basement Alun-Alun namun masih diberi kamar-kamar kecil dan tidak ada ventilasi. Setelah adanya penataan ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Basement ini di renovasi kembali dimana lokasi tiap-tiap PKL menjadi lebih luas dan diberi ventilasi yang lebih besar sehingga tempat relokasi PKL yang baru jauh lebih nyaman dari yang sebelumnya (wawancara pada tanggal 23 februari 2018 di Alun-Alun Bandung)

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas telah dijelaskan bahwa Dinas Tata Ruang merupakan salah satu Dinas yang berperan dalam proses penataan PKL, dimana tugas bidang penataan PKL ini telah ditetapkan kedalam Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012. Tugas dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung yaitu mendesain tempat relokasi PKL yang baru, melaksanakan penempatan PKL di masing-masing zonanisasi, dan melaksanakan penataan PKL di masing-masing

zonanisasi. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Dinas tata Ruang bekerjasama dengan Kewilayahan. Dimana kewilayahan bertugas untuk menyampaikan informasi lengkap terkait para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dijelaskan oleh Bapak Irvan selaku staff di Bidang Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang dapat dipahami bahwa dalam tahap pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam PERWAL No 888 Tahun 2012 dimana bidang penataan mempunyai tugas untuk melaksanakan penempatan dan penataan PKL menjadi lebih rapih dan teratur. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tata Ruang berupaya melakukan penataan dengan mendesain dan membangun lokasi yang baru sesuai dengan luas dan kapasitas yang tersedia. Dinas Tata Ruang berusaha menata relokasi PKL menjadi relokasi yang nyaman dan strategis bagi para PKL. Dinas Tata Ruang tidak ingin mendesain relokasi PKL berdasarkan jumlah PKL melainkan berdasarkan kapasitas luas wilayah yang akan di relokasi, sehingga dalam proses penataan ini diperlukan hasil data PKL yang berasal dari Bappelitbang untuk menentukan PKL mana yang layak untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suparti yang merupakan salah satu PKL di Balonggede dan Ibu Ani yang merupakan salah satu PKL di Alun-Alun Kota Bandung juga dapat dipahami bahwa pelaksanaan penataan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang ini sudah cukup memuaskan bagi para PKL dimana pelaksanaan penataan

relokasi PKL di Kota Bandung jauh lebih nyaman dan rapih dari lokasi PKL yang sebelumnya.

### **3) Bidang pembinaan yang diurus oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung**

Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mengelola Pedagang Kaki Lima dengan cara-cara yang humanis. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung bukan hanya melakukan penertiban, namun pemerintah juga berusaha untuk memberikan pembinaan terhadap para PKL. Dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab pembinaan PKL kepada Dinas KUMKM Kota Bandung. Dinas KUMKM ini memiliki 2 jenis pembinaan yakni pembinaan untuk pemberdayaan dan pengembangan serta pemfasilitasan dan pembiayaan. Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Kota Bandung dan Dinas UMKM Kota Bandung memerlukan adanya komunikasi yang baik dari pemerintah terhadap Satgasus dan para PKL yang akan dibina. Komunikasi merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan interaksi sosial, tanpa adanya komunikasi maka proses pembinaan terhadap para PKL tidak akan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin merupakan peranan penting karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan bermacam-macam pribadi, latar belakang serta watak yang berbeda sehingga seorang pemimpin sangat perlu untuk mengenali bawahannya maupun

orang-orang yang akan di pimpin. Komunikasi organisasi diperlukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Dinas UMKM dalam proses pemberdayaan dan pembinaan PKL agar penyampaian informasi yang didapat menjadi lebih bermanfaat, dapat diterima serta menjadi nilai yang berarti dalam proses pembinaan PKL di Kota Bandung. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rikky selaku anggota dinas UMKM bidang usaha non formal Kota Bandung bahwa:

“dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan PKL ini, kita sangat memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan satgasus, serta antara satgasus dengan PKL yang akan di bina. Pemerintah kota Bandung berkomunikasi dengan cara menghimbau kepada para anggota satgasus untuk melakukan pembinaan dengan cara mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku para PKL dengan pelan-pelan tanpa ada kekerasan. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar pembinaan dan pemberdayaan PKL dapat langsung diterima oleh PKL yaitu dengan melakukan pertemuan–pertemuan di Pendopo (Rumah Dinas Walikota) untuk bertemu langsung, berdiskusi dan makan bersama dengan beberapa anggota Satgasus serta beberapa anggota dari forum PKL yang akan di relokasi dan di bina. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung)”.

Pemerintah Kota Bandung melakukan komunikasi vertikal dalam penerapan pembinaan dan pemberdayaan PKL ,dimana Pemerintah berusaha membangun komunikasi antara pemimpin dan bawahan serta aktor penerap kebijakan pembinaan PKL terhadap PKL itu sendiri. Pada tahun 2017 dinas KUMK telah melaksanakan beberapa inovasi dalam pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung seperti yang telah ditetapkan dalam Perwal No 888 tahun 2012. Inovasi penataan PKL pertama yang dilakukan adalah Bimbingan Teknis (BinTek) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf para PKL. Bapak Rikki selaku

anggota dinas UMKM bidang usaha non formal Kota Bandung menjelaskan:

“Dinas KUMKM telah melakukan beberapa pembinaan semenjak tahun 2017 kemarin, yang pertama kita telah melakukan BinTek (Bimbingan Teknis) kepada para PKL dengan harapan agar para PKL naik kelas satu tingkat dari PKL biasa. Kita melakukan BinTek dengan membimbing para PKL untuk membentuk koperasi atau mengajarkan pada PKL untuk berjualan dengan media online. Seperti yang kita tahu ya, sekarang ini sangat sulit berjualan dengan peluang keuntungan yang besar karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang lebih meyakinkan. Untuk itulah kita adakan bintek ini. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”



**Gambar 4.5: BinTek dengan para PKL basement Alun-Alun Kota Bandung**

Sumber: arsip Dinas KUMKM Kota Bandung

Gambar 4.5 menunjukkan salah satu pelaksanaan kegiatan BinTek pembinaan dan pembentukan organisasi bagi para PKL Basement Alun-Alun Kota Bandung. Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas KUMKM berusaha untuk membentuk organisasi yang membawa dampak positif bagi para PKL. Para PKL di undang untuk datang ke sosialisasi BinTek dan disana mereka di ajarkan dan di bimbing bagaimana caranya agar



para PKL bisa berkembang dan dapat dilihat oleh masyarakat banyak. Kegiatan pembinaan lain yang dilakukan oleh Dinas KUMKM adalah melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dengan melakukan temu usaha antara PKL dengan Lembaga Keuangan serta memfasilitasi program magang dan program studi komparatif. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Rikki selaku anggota Bidang Usaha non formal Dinas UMKM Kota Bandung:

“Tindakan lain yang kita lakukan adalah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dengan melakukan temu usaha antara PKL dengan lembaga keuangan lain seperti bank BJB dan BUMN, karena pasti banyak yang bilang butuh modal. Maka dari itu kita fasilitasi dengan melakukan temu usaha ini. Kita juga bekerja sama dengan bank bjb mbak, yaitu dengan membentuk KCR (Kredit Cinta Rakyat). Di sini para PKL bisa meminjam modal dengan bunga 0%. Hal ini bertujuan agar para PKL terhindar dari koperasi-koperasi keuangan yang meminjamkan uang dengan bunga besar. Kita juga bekerja sama dengan BUMN untuk memperoleh sponsor dana dalam proses penataan dan relokasi. Dalam hal ini setiap BUMN harus mempunyai PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha PKL. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”



**Gambar 4.6: Kegiatan temu usaha antara PKL Ujungberung dengan lembaga keuangan**

sumber: Arsip Dinas KUMKM Kota Bandung



**Gambar 4.7 : Relokasi PKL yang disponsori oleh Teh Botol Sosro dan Lee Mineral**

Pak Rikky juga menjelaskan bahwa selain Bimbingan Teknis (BinTek) dan Kegiatan Temu Usaha antara PKL dan lembaga keuangan, Dinas UMKM juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap PKL terkait bantuan bimbingan manajemen yaitu :

“Dinas UMKM juga memberikan bantuan manajemen dan memfasilitasi sumber pendanaan, disini kita membimbing para PKL supaya mereka mencatat hasil penjualan dan pengeluaran mereka agar mereka tau berapa keuntungan mereka perhari dan bagaimana caranya agar keuntungan yang rendah bisa meningkat dari yang sebelumnya. Pencatatan keuntungan dan pengeluaran ini kan juga bertujuan agar para PKL mempunyai perencanaan kedepannya. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh Dinas KUMKM dalam proses pembinaan PKL ini merupakan kegiatan promosi hasil dagangan PKL kepada masyarakat Kota bandung. Kehadiran masyarakat pada



tempat relokasi PKL yang baru merupakan hal yang paling penting demi kelancaran Strategi kebijakan penataan PKL yang telah ditetapkan oleh WaliKota Bandung, sehingga Dinas UMKM berusaha untuk mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai lokasi wisata belanja. Seperti yang dikatakan Bapak Rikky selaku anggota dinas UMKM bidang usaha non formal Kota Bandung bahwa:

“ Selain melakukan literasi keuangan, kita juga memiliki seksi promosi dan pemasaran. Kita mengikuti PKL-PKL yang bagus dalam beberapa pameran atau acara untuk kita promosikan seperti Bandung Airlol. Selain itu kita juga mempromosikan tempat tempat yang sudah berhasil di relokasi agar masyarakat Kota Bandung tahu bahwa keadaan PKL sudah rapih dan menarik untuk di datangi, seperti Alun-Alun Kota Bandung, Daerah Cihampelas, Cibadak, dan lain lain. Kita juga memfasilitasi PKL untuk ikut pameran tingkat kota agar masyarakat lebih mengenal lagi. (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”



**Gambar 4.8:** acara promosi dan pengenalan lokasi PKL yang telah di relokasi

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh informan diatas, strategi penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu dengan melaksanakan penataan dan pembinaan

dengan menggunakan komunikasi yang baik terhadap PKL sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal dengan melakukan pembinaan, pengelolaan, dan sosialisasi terhadap PKL Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung tidak hanya berusaha untuk menertibkan PKL namun juga memanusiakan para PKL tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandung menertibkan, merelokasi dan menata PKL namun tidak begitu saja meninggalkan PKL yang telah di tata dan di tertibkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Bandung masih berusaha membina dan membimbing PKL kearah yang lebih baik lagi melalui Dinas KUMKM. Pemerintah Kota Bandung juga berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik didalam melakukan pembinaan seperti menghimbau para penegak kebijakan untuk menggunakan pendekatan Persuasif maupun *Win-win solution*. Tujuan dari pembinaan ini yaitu agar setiap informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung maupun UMKM dapat diterima dengan baik oleh para PKL seta para PKL Kota Bandung juga bisa berkembang dan berubah status dari usaha non formal menjadi usaha formal.

Pada tahun 2017 Dinas UKMKM terus menerus membina PKL melalui beberapa inovasi yang telah ditetapkan dalam Perwal No 888 tahun 2012 yaitu adanya Bintek (Bimbingan Teknis), pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi, memberikan bantuan manajemen keuangan, memfasilitasi sumber pendanaan serta melakukan kegiatan promosi hasil dagang dari PKL yang sudah di tata dan di

relokasi. Dari hasil wawancara terhadap Dinas KUMKM dan wawancara terhadap beberapa PKL yang berada di Kota Bandung, penulis dapat menyimpulkan bahwa Inovasi-inovasi yang telah ditetapkan oleh Perwal No 888 tahun 2012 telah terlaksana dengan baik terhadap PKL di tiap-tiap kewilayahan. Banyak PKL yang telah merasakan manfaat dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM. Namun dalam pelaksanaan inovasi tersebut masih ada beberapa PKL yang menolak untuk di tata dan di bina karena sudah nyaman dengan keadaan yang sebelumnya. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penataan PKL di Kota Bandung.

**4) Bidang Pengawasan yang diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang Bertugas Sebagai Pengendalian dan Penegakan Hukum.**

Salah satu komponen instansi yang terlibat dalam Satgasus PKL adalah Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Lembaga ini memegang kekuasaan dalam fungsi pengawasan, pengendalian, dan penertiban PKL. Dalam proses penataan PKL ini, Pemerintah Kota Bandung sudah berupaya melakukan penataan mulai dari pendataan, perencanaan, penerapan pelaksanaan zonanisasi dan hingga tahap pembinaan dan pembimbingan PKL ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, apabila masih ada para PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka disinilah Satpol PP bekerja untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Seperti halnya yang telah dijelaskan

oleh Bapak Ahmad Fauzan sebagai Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Satpol PP Kota Bandung bahwa:

“Satgasus ini dibentuk dari beberapa SKPD, dimana beberapa dinas bekerjasama untuk melakukan penataan dan penertiban PKL. Langkah langkahnya itu di mulai dari perencanaan, penataan, hingga pembinaan. Namun, jika masih ada para PKL melanggar dan tidak taat aturan, maka disini kita berfungsi sebagai pengendali dan penegak hukum mbak, kita bekerja sesuai dengan tugas yang di tetapkan, dimana kita akan selalu melakukan pengawasan paling sedikit 3 kali di 3 zona dengan waktu tidak menentu (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Bapak Ahmad Fauzan juga menambahkan bahwa:

“jika ada PKL yang masih berjualan di zona merah atau melanggar peraturan yang telah di tetapkan maka kita akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 hari. Apa bila PKL tersebut masih tetap melanggar kita akan mencabut Tanda Pengenal dan melarang PKL tersebut untuk melakukan aktivitas berdagang. Bagi para PKL yang berasal dari luar Daerah Bandung, kita tetap menertibkan mbak. Dengan cara kita akan memberikan denda mereka sebanyak Rp 1.000.000 apabila mereka tidak dapat memenuhi nya. Maka kita akan melakukan penahanan. Hal ini bertujuan agar jumlah PKL di Kota Bandung dan lebih teratur lagi (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Pengawasan dilakukan untuk mengontrol sejauh mana program yang telah dilakukan dan dilaksanakan, apakah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melaksanakan tugasnya dalam pengawasan terhadap kegiatan penataan PKL dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam Penataan PKL yaitu dengan membentuk bidang pengawasan di Satgasus dimana tugas dan fungsinya telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung No.511.23/kep 499.Dis.KUMKM/2017 dan terkadang terjun langsung



kelapangan untuk mengawasi para PKL yang masih melanggar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Fauzan selaku kepala Bidang Pelatihan perlinmas di kantor Satpol PP Kota Bandung yang mengatakan bahwa:

“pengawasan yang dilakukan terhadap proses penataan dan penertiban PKL di Kota Bandung ini yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Seperti halnya Satgasus PKL sudah memiliki bidang pengawasan dalam penataan PKL yakni Satpol PP. Namun terkadang Pak Ridwan Kamil juga ikut turun langsung beroperasi dengan kita untuk melihat-lihat dan mengawasi daerah yang telah di relokasi dan daerah yang termasuk kedalam 3 zona tadi. Apabila masih ada PKL yang melanggar Pak Ridwan Kamil juga mau turun langsung untuk menasehati PKL tersebut (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.



**Gambar 4.9 : Walikota dan Wakil Walikota Bandung mendatangi pedagang di *skywalk* dan Balonggede cihampelas**

Gambar 4.9a memperlihatkan salah satu aksi yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dalam melakukan komunikasi terhadap PKL di *Skywalk* Cihampelas. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan beliau terlihat beberapa kali datang untuk melihat-lihat dan melakukan pengawasan serta berkomunikasi dengan PKL tersebut. Bapak Walikota Bandung tersebut juga terkadang ikut membeli dan makan di tempat PKL yang telah direlokasi. Seperti halnya gambar 4.9b yang merupakan bentuk pengawasan langsung yang dapat di saksikan oleh Penulis di lokasi perayaan pembukaan dan pengesahan lokasi Balonggede yang merupakan Zona hijau yang telah di tata menjadi lokasi wisata kuliner dan tampak lebih rapih dari yang sebelumnya.

Hal lain diungkapkan oleh Pak irvan selaku staff dibidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang menambahkan bahwa:

“pengawasan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dalam penataan dan penertiban PKL ini bisa dibilang ketat ya mbak karena adanya bidang khusus yang melakukan pengawasan yakni Satpol PP. Disini pengawasan dilakukan dengan adanya koordinator antar Sarpol PP dan Satgasus serta Walikota sehingga pengawasannya cukup ketat dan terarah (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung)”.

Dari hasil wawancara sebagaimana diatas yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad fauzan dapat dipahami bahwa Satpol PP Kota Bandung sudah berusaha melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dengan sebaik-baiknya. Dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap PKL. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung khususnya Walikota Bandung dalam proses penataan dan penertiban PKL di Kota

Bandung dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan Walikota secara langsung yaitu dengan cara ikut serta bergabung dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan turun langsung untuk mengawasi dan melihat lihat keadaan PKL dan terkadang turun langsung untuk memperingati Para PKL yang masih melanggar peraturan. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas sebagai bidang pengawasan dan penegak hukum dalam proses penataan PKL Kota Bandung.

Dari hasil wawancara Satpol PP selalu melakukan pengawasan paling sedikit 3 kali sehari atau lebih di 3 zona PKL dengan waktu yang tidak menentu. Dalam hal ini Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan dengan ketat dimana yang telah di tuliskan dalam Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012 bahwa tugas bidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan hanya 2 kali sehari di Zona merah, 1 kali seminggu di zona kuning dan 1 kali dalam 3 bulan di zona hijau dengan waktu tidak menentu. Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan lebih dari yang ditentukan oleh Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012, Hal ini bertujuan agar para PKL lebih tertata rapi dan lebih tertib lagi. Namun dalam proses penelitian yang dilakukan penulis terkait bidang pengawasan di salah satu zona PKL Kota Bandung masih ada beberapa PKL yang beraktivitas di zona merah, namun diyakini bahwa para PKL yang melanggar tersebut paling banyak masyarakat yang bukan penduduk Kota Bandung. Satpol PP tidak pernah melakukan



tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengendalian dan penegakan hukum karena mereka selalu melakukan peringatan dengan cara tertulis agar proses pengawasan dan penertiban ini lebih bersifat humanis.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Penataan PKL Di Kota Bandung melalui Gaya Kepemimpinan Demokratik.**

### **a. Faktor Pendukung**

Pada sebuah pelaksanaan strategi melalui berbagai program-program di suatu instansi pemerintahan tidak akan pernah lepas dari faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor pendukung dalam penataan PKL Kota Bandung berasal dari Pemerintah Kota Bandung, stakeholder maupun PKL itu sendiri, yaitu memberikan kontribusi positif terhadap jalannya proses penataan PKL Kota Bandung. Hal ini disadari betul oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga pada dasarnya faktor pendukung ini selalu dianggap sebagai salah satu modal penting untuk menuju keberhasilan pencapaian penataan PKL. Faktor-faktor pendukung pada saat penataan PKL ini adalah:

#### **1) Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL**

Faktor pendukung yang pertama adalah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai di Pemerintahan Kota Bandung. Khususnya Dinas Bappelitbang, Dinas

Tata Ruang, Dinas UMKM dan Dinas Satpol PP yang merupakan bagian dari Satgas Penataan PKL di Kota Bandung. pemanfaatan sumber daya aparatur ini merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan dari suatu strategi. Jika pihak yang menjalankan strategi penataan PKL tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai dalam menetapkan program-program dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang tersedia, maka pelaksanaan strategi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Irvan selaku Staff di Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang:

“permasalahan keberadaan PKL kan merupakan tanggungjawab bersama bagi setiap aparatur yang ada dalam Pemerintahan Kota. bukan hanya tanggungjawab satpol PP ataupun Pemimpin Kota saja. sehingga disini Pemerintah Kota Bandung berusaha menyelesaikan masalah PKL dengan memanfaatkan beberapa dinas untuk melakukan penataan PKL dari tahap perencanaan, penataan, pembinaan hingga pengawasan untuk mendukung dan mencapai keberhasilan yang diharapkan oleh Kota Bandung terkait permasalahan PKL (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung)”.

Selain pemanfaatan Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bandung juga memanfaatkan kompetensi dan kapasitas yang ada didalam kelompok PKL dengan membentuk koordinator PKL untuk mempermudah proses penataan PKL. Adanya kompetensi serta kapasitas yang terdapat dalam Pemerintahan dan kelompok PKL sangat mendukung penerapan strategi penataan yang mampu mengoptimalkan setiap program-program yang akan dilaksanakan. Bapak Ahmad Fauzan sebagai

Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Satpol PP Kota

Bandung bahwa:

“faktor pendukung dalam penerapan strategi penataan ini harus berasal dari internal sini. Kami satgasus PKL disini membuat program-program penataan tersebut terlebih dahulu kami sesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga disini kami juga memanfaatkan koordinator setiap PKL yang dibentuk kedalam forum PKL. tentunya kami mengupayakan dengan sumber daya yang baik. Setelah ada data atau informasi untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan strategi, kemudian kita akan berdiskusi bersama Pemimpin daerah dan forum PKL untuk menentukan lokasi mana yang akan ditata dan bagaimana penataannya (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Berdasarkan hasil Wawancara sebagaimana diatas dapat dipahami bahwa pernyataan tersebut menguatkan bahwa kemampuan masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satgasus Penataan PKL Kota Bandung dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan strategi penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang diurus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang diurus oleh Satpol PP. Pemerintah Kota Bandung juga mengikut sertakan Sumber Daya Manusia yang ada dalam PKL untuk membantu Strategi penataan dengan membentuk Forum PKL yang bertugas untuk mewakili kelompok PKL di tiap wilayah dalam menyampaikan Aspirasi maupun kebutuhan para PKL. Sehingga strategi Penataan PKL di Kota Bandung lebih terarah dan terkoordinir.

## 2) Program Kemitraan

Faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan strategi penataan PKL ini adalah adanya program kemitraan dengan berbagai sektor yang meliputi instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, salah satunya seperti Bank BJB yang bekerja sama dengan Satgasus dalam memberikan bantuan modal melalui peminjaman dengan bunga 0% untuk membantu paraPKL yang kekurangan modal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rikki selaku anggota Bidang Usaha non formal Dinas UMKM Kota Bandung:

“memang benar salah satu faktor pendukung yang berasal dari luar ini adalah jalinan kemitraan atau kerjasama yang kami bangun. Baik itu dengan sektor swasta maupun UKM yang ada di Kota Bandung. program kemitraan ini sangat mendukung jalannya program-program penataan, pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk dana maupun bantuan fasilitas dagangan (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas KUMKM Kota Bandung).”

Program kemitraan yang dijalin baik dengan sektor Pemerintahan maupun sektor swasta memberikan dampak yang menunjang terhadap pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung. seperti bantuan dana yang diberikan Bank BJB, Bantuan meja yang diberikan oleh Lee Mineral, dan Bantuan gerobak yang diberikan oleh Teh Botol Sosro sangat membantu tercapainya tujuan dari penataan PKL yang memberdayakan para PKL naik satu tingkat dari kehidupan PKL yang sebelumnya. Penjelasan tersebut juga

didukung oleh Bapak Ahmad Fauzan sebagai Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Satpol PP Kota Bandung:

“program kemitraan ini memang sangat membantu sekali dalam pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung. Satgasus khususnya Dinas UMKM dan Pemerintah Kota Bandung berusaha membangun kerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu penatan PKL ini. Seperti penyediaan gerobak penjualan yang disediakan oleh Teh Botol Sosro bagi PKL yang berada di Balinggede, membuat lapak penjualan di Balonggede semakin enak dipandang. Otomatis pembeli pun semakin tertarik dan nyaman dengan keadaan lokasi PKL tersebut (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Berikut ini adalah foto dokumentasi yang didapat oleh penulis di lapangan dari pemberian bantuan gerobak PKL yang diberi oleh Teh Botol Sosro kepada para PKL yang telah di tata di Jl. Balonggede:



**Gambar 4.10: Bentuk Bantuan yang Diberikan Oleh Teh Botol Sosro Terhadap PKL di Balonggede**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan strategi penataan PKL di Kota Bandung di pengaruhi oleh faktor eksternal seperti program



kemitraan yang sangat mendukung keberhasilan strategi penataan PKL. Seperti salah satunya aktor kemitraan dengan Teh Botol Sosro yang memberikan bantuan gerobak kepada para PKL dan membuat lokasi dagangan para PKL di ruang lingkup Balonggede Kota Bandung menjadi lebih menarik. Tentunya program kemitraan ini harus terus dikelola dan dikembangkan agar strategi penataan ini dapat berjalan dengan lancar dan terfasilitasi.

#### **b. Faktor Penghambat**

Dalam strategi penataan PKL melalui gaya kepemimpinan demokratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak sempurna –merta berjalan mulus. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan strategi penataan PKL melalui gaya kepemimpinan demokratis di Kota Bandung yaitu diantaranya berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi tersebut sedangkan faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi.

##### **1) Anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana**

Hambatan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Satgas penataan PKL Kota Bandung dalam melaksanakan penataan dan penertiban PKL dipengaruhi dengan adanya anggaran yang terbatas yang disediakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana penataan PKL di Kota Bandung dan juga penyediaan kawasan lokasi usaha

PKL. Menurut Bapak Irvan selaku staff di bidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa:

“hambatan yang paling kita rasakan adalah masalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi sarana dan prasarana proses relokasi masih kurang mbak. Karena kurangnya anggaran inilah yang membuat dinas atat ruang sulit untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memuaskan bagi PKL. Sejauh ini kita masih menggunakan fasilitas umum yang tersedia dalam menatakan tempat relokasi PKL. Selain sarana dan prasarana, kita juga kekurangan anggaran untuk membeli tanah swasta sebagai tempat relokasi PKL yang baru, sehingga selama ini kita hanya memanfaatkan tanah yang dimiliki pemerintah untuk tempat relokasi yang baru serta memanfaatkan kerjasama antar swasta agar mau membagi sedikit lapaknya bagi para PKL (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung)”.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diatas kepada Bapak Irvan selaku staff di bidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang, dapat dipahami bahwa hambatan internal yang ada dalam pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung adalah anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana seperti lahan/lokasi untuk menjadi tempat relokasi berjualan bagi para PKL di Kota Bandung. Selain itu minimnya anggaran yang tersedia untuk menjalankan strategi penataan PKL mulai dari penataan, pembinaan, dan pengembangan usaha untuk para PKL ini juga menjadikan penghambat yang menyebabkan lemahnya daya saing sektor informal utamanya yaitu pedagang kaki lima di Kota Bandung.

## **2) Banyaknya PKL yang Berasal Dari Luar Kota Bandung**

Banyaknya jumlah PKL yang ada di Kota Bandung tentunya juga menjadikan persaingan antara PKL menjadi semakin tinggi.



Dari pendataan terakhir total keseluruhan PKL yang ada di Kota Bandung pada tahun 2015 adalah sebanyak 22.359 PKL yang tersebar diberbagai tempat. Dari keseluruhan PKL yang ada di Kota Bandung tidak semuanya penduduk asli Kota Bandung. Dimana 11.237 PKL merupakan penduduk asli Kota Bandung dan 11.122 PKL merupakan penduduk luar Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Irvan selaku staff di bidang pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa:

“jumlah PKL yang berada di Kota Bandung bukan hanya dari daerah sini saja tetapi juga banyak yang berasal dari luar daerah kota bandung. nah hal ini lah yang menyebabkan adanya persaingan antara PKL di Kota Bandung. dominannya PKL dari luar daerah Kota Bandung memperjualkan makanan maupun minuman serta dagangan lain sesuai dengan khas dari daerahnyam contohnya seperti tahu sumedang dan mochi khas sukabumi. Otomatis masyarakat umum akan tertari untuk membeli karena barang dagangannya jarang ditemui di Kota bandung.hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat dari strategi oenataan PKL di Kota Bandung (wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Dinas Tata Ruang Kota Bandung)”.

Keberadaan jumlah PKL yang meningkat di perkotaan diakibatkan karena adanya arus urbanisasi dari desa ke kota. Minimnya penyerapan tenaga kerja serta upah kerja yang berada di pedesaan membuat masyarakat desa maupun kabupaten berbondong-bondong datang ke Kota. namun mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan kecenderungan usaha yang dapat mereka lakukan adalah sebagai PKL. Hal ini lah yang menyebabkan jumbalah PKL semakin meningkat dan tak kunjung selesai penataannya sehingga permasalahan PKL di Pemerintah Kota tidak akan kunjung usai dan menjadi masalah yang berkepanjangan. Penjelasan tersebut juga didukung

dengan hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku ketua Pelatihan Perlindungan Masyarakat Di Kantor Satpol PP Kota Bandung yang menyatakan bahwa:

“ jumlah PKL di Kota Bandung ini masih cukup besar, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Bappelitbang setengah dari jumlah PKL di Kota Bandung berasal dari luar daerah. Hal ini lah yang menjadi penghambat dalam melakukan penataan PKL. Para PKL yang melanggar Penataan PKL di kota Bandung diyakini merupakan para PKL yang bersal dari luar daerah, karena mereka tidak tau peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak memiliki tempat untuk berjualan. Sedangkan para PKL yang berkependudukan Kota Bandung otomatis sudah disediakan tempat. Oleh karena itu lah ditetapkan bahwa setiap PKL yang berhak menikmati fasilitas adalah para PKL yang memiliki KTP (Kartu Tanda Pedagang) .(wawancara pada tanggal 05 februari 2018 di Kantor Satpol PP Kota Bandung)”.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya Para PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung yang menyebabkan permasalahan penataan PKL di Kota Bandung menjadi terhambat. Tidak hanya itu, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia juga menghambat penerapan sttegi penataan PKL di Kota Bandung. Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung dan Satgasus Penataan PKL Kota Bandung tetap mengusahakan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para PKL serta membentuk inovasi pembentukan KTP (Kartu Tanda Pedagang) bagi para PKL Kota Bandung. Ktp inilah yang menjadi pembeda bagi para PKL yang berkependudukan Kota Bandung dan PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung.

#### **D. Analisis dan Hasil Pembahasan**

##### **1. Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratrik**

Sektor informal seperti PKL merupakan sektor yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang sedang gonjang-ganjing dan dapat menopang ekonomi atas. Para PKL dapat menghidupi kehidupan mereka sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah namun mereka juga dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dalam pemerintahan. Sehingga pemerintah memikirkan bagaimana cara agar para PKL dapat tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tetapi tidak melanggar dan mengganggu keindahan lingkungan Kota layaknya kepemimpinan yang demokratis, seperti yang dijelaskan oleh Siagian (2001) tentang peranan Pemerintah selaku stabilitator ekonomi dimana pemerintah diharapkan untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dapat terpelihara sedemikian rupa.

Kepemimpinan Pemerintah Daerah yang demokratis, selain sebagai stabilitator ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, pemimpin yang demokratis juga harus berperan sebagai pemberi motivasi bagi masyarakat agar dapat merangsang para bawahannya maupun masyarakatnya untuk ikut bekerja dalam mencapai tujuan. Sunindhia dan Widiyanti (1993:46-53), menuliskan bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa teori salah satunya adalah teori psikologis dimana fungsi

pemimpin yaitu mengembangkan sistem motivasi yang terbaik untuk merangsang kesediaan bekerja para bawahannya, karena seorang pemimpin juga perlu untuk memperhatikan aspek-aspek psikis/kejiwaan bawahannya seperti harga diri, keinginan dan harapan.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung membentuk Perda No 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung. Seperti yang dituliskan oleh Muluk (2009) dalam Wida Ristanti (2016:21) bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas sejauh mungkin untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran, ketidakadilan dan tekanan dari anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan keadilan administrasi secara pasti. Kebutuhan masyarakat diluar hal ini harus dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Defenisi strategi yang dimaksud oleh Pasolog (2010:90) merupakan sebuah kiat, cara ataupun taktik yang dirancang secara sistematis dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Suatu strategi dapat dikatakan baik apabila didalamnya terdapat koordinasi tim dalam bekerja dan dapat mencakup keseluruhan masalah yang dihadapi dengan melihat sisi eksternal dan internalnya. Latar belakang Pemerintah Kota Bandung dalam membentuk

Satgasus penataan PKL yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Bandung akibat keberadaan PKL khususnya terkait keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan masyarakat. Namun di sisi lain, Pemerintah masih mempertimbangkan dampak positif dari keberadaan PKL ini.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam strategi penataan PKL di Kota Bandung, Pemerintah berusaha untuk membuat strategi yang efektif dan efisien dengan membentuk Satgasus Penataan PKL yang terdiri dari beberapa SKPD untuk bekerjasama membantu Walikota dalam mengatasi permasalahan PKL yang terjadi di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk membangun koordinasi antar beberapa dinas dan memberikan motivasi kepada Satgasus dan para koordinator pkL yang telah dibentuk untuk mau mengikuti dan menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung No 04 tahun 2011. Pelaksanaan penerapan strategi penataan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara adanya pendekatan kepemimpinan yang demokratik, Pemerintah Kota Bandung memberikan motivasi, kebebasan dan kepercayaan yang cukup kepada anggota Satgasus dan para PKL untuk ikut berusaha dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Sukarna (1990:44) bahwa salah satu pendekatan yang digunakan dalam kepemimpinan demokratik merupakan pendekatan kepemimpinan yang motivatif. Dimana pemimpin dapat mengkomunikasikan setiap ide-ide

maupun gagasannya serta mampu mempengaruhi bawahannya untuk mau bekerja dengan rasa cinta, rasa sayang dan ikhlas.

Strategi penataan PKL yang dilaksanakan di Kota Bandung yaitu dengan memebentuk Satgasus PKL dan memberikan tugas dan fungsi kepada beberapa dinas di Pemerintahan Kota Bandung yakni:

**1) Perencanaan dan Pendataan PKL yang dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)**

Pelaksanaan perencanaan merupakan salah satu serangkaian proses dalam melaksanakan suatu strategi. Menurut Nawawi (2005:46) perencanaan adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang mempunyai pengertian sebagai pemilihan dan penempatan tujuan, pemilihan keputusan tentang apa yang akan dilaksanakan, penetapan pengetahuan tepat guna secara sistematis dan pelaksanaan persiapan kegiatan yang dilakukan melalui perumusan dan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Bandung dan Bappelitbang berusaha untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan anggota Satgasus dan para koordinator PKL. Sehingga anggota Satgasus maupun para PKL dapat memberikan saran-saran terkait perencanaan penataan PKL, seperti halnya yang ditulis oleh Kartono (2002:53) bahwa salah satu metode pemimpin demokratik yaitu peka terhadap saran-saran, dimana pemimpin harus luwes dan terbuka serta mau menghargai pendapat orang lain dan mengkombinasikannya kedalam keputusan yang akan diambil.



Pemerintah Kota Bandung dan bappelitbang selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik kepentingan masyarakat, Pemerintah Kota, dan para PKL itu sendiri layaknya kepemimpinan yang demokratik. Seperti halnya yang dituliskan M.Karjadi (1982:12) menuliskan bahwa kepemimpinan demokratik merupakan pemimpin yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu mau menerima saran-saran dari bawahannya maupun masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam proses penataan PKL di Kota Bandung, Bappelitbang merupakan salah satu anggota Satgasus yang berperan sebagai bidang perencanaan dan pendataan dalam Penataan PKL. Dalam pelaksanaannya Bappelitbang bertugas untuk mengumpulkan data terkait PKL dan menyusun rencana Penataan dan Pembinaan PKL yang berisi langkah-langkah terarah dalam mencapai tujuannya. Dalam merencanakan strategi penataan PKL, Pemerintah harus memperhatikan kondisi yang ada dan menuangkannya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melakukan pendataan dan pencarian informasi terkait PKL yang bertujuan untuk lebih mengetahui kondisi lingkungan PKL yang ada dan mengetahui tingkat kesulitan masalah yang dihadapi. Dengan adanya pendataan ini, Bappelitbang akan lebih mudah untuk menentukan dan merencanakan PKL mana saja yang akan direlokasi dan ditata sesuai dengan data yang didapat. Pendataan ini bertujuan agar strategi penataan PKL jatuh ke sasaran yang tepat dan tidak menimbulkan masalah PKL lagi. Seperti halnya Salusu (2002:24) menjelaskan beberapa komponen strategi yang salah satunya merupakan

tingkat kesulitan masalah, dimana masalah dan sifat masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi berbeda-beda sehingga organisasi tersebut harus melakukan analisis informasi dan masalah yang akan muncul agar kedepannya tidak menimbulkan gejala masalah yang sama.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis didapat bahwa dalam strategi perencanaan dan pendataan PKL di Kota Bandung. Pemerintah daerah Kota Bandung memberikan kebebasan dan kepercayaan yang cukup kepada Bappelitbang untuk ikut berusaha dalam menyelesaikan permasalahan keberadaan PKL dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk melakukan pendekatan yang baik kepada bawahannya dengan cara mendorong dan menggerakkan para PKL untuk ikut berpartisipasi dalam proses penataan, dan mengikut sertakan bawahannya dalam memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan keputusan yang akan ditetapkan agar pengambilan keputusan dalam penataan PKL di Kota Bandung lebih bersifat mufakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sukarna (1990:44) dalam bukunya "Kepemimpinan Dalam Administgrasi" menuliskan gaya kepemimpinan demokratik merupakan gaya kepemimpinan yang menggunakan pendekatan kepemimpinan partisipatif, dimana pemimpin selalu memberikan kesempatan kepada yang dipimpin untuk ikut secara aktif dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pemerintah Kota Bandung dan Bappelitbang juga berusaha untuk memanfaatkan koordinasi secara internal terhadap Kewilayahan untuk melakukan pendataan terkait PKL karena Kewilayahan merupakan dinas

yang lebih dekat dengan para PKL. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Siagian (2002:200) bahwa manfaat strategi diantaranya yaitu mempermudah koordinasi secara internal diantara organisasi dan terjalin komunikasi yang interaktif sehingga mengurangi resiko konflik internal. Tiap-tiap kewilayahan akan mendata PKL yang berada di wilayahnya. Dalam mempermudah pendataan ini, setiap PKL yang berada di kewilayahan akan membentuk forum PKL sehingga penyampaian informasi dalam perencanaan penataan PKL terlaksana dalam 2 arah.

Pendataan ini dilakukan *by name by address* untuk menentukan PKL mana yang berhak untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Pedagang) dan dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pengkoordinasian antara Bappelitbang terhadap Kewilayahan serta Kewilayahan terhadap Forum PKL merupakan manfaat strategi yang diharapkan dimana didalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan untuk saling memberikan informasi dan bekerjasama untuk mengatur dan melakukan perencanaan penataan PKL.

## **2) Penataan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang**

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melakukan penataan ruang, suatu Dinas Tata Ruang harus terlebih dahulu melakukan strategi penyusunan rencana tata ruang. Dimana strategi penyusunan rencana tata ruang harus dilandaskan pada pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, dan pelaksanaanya bersumber dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan di tiap sektor yang akan di tata.

Salusu (2008:101) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan ataupun sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan cara menggunakan hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pemerintah Kota Bandung berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pemerintahannya untuk mencapai sasaran penataan PKL di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menggunakan beberapa dinas untuk ikut ambil bagian dalam Penataan PKL di Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi di tiap-tiap dinas tersebut. Seperti halnya Dinas Tata Ruang yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang, sebagian bidang pekerjaan umum dan sebagian bidang perumahan.

Pemerintah memanfaatkan Dinas Tata Ruang untuk ambil alih dalam penataan PKL dengan tugas yakni menata PKL dengan mendesain tempat relokasi dan melaksanakan penempatan PKL di masing-masing zonanisasi. Dalam melaksanakan strategi, Salusu (2002) menjabarkan 4 komponen dalam penyusunan strategi yang mana salah satunya adalah kompleksitas lingkungan, dalam hal ini kompleksitas lingkungan dipengaruhi oleh aktivitas pihak-pihak diluar organisasi, selain berusaha merespon kompleksitas tersebut, organisasi juga harus dapat memprediksi skenario yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Identifikasi pihak-pihak di luar organisasi tentu menjadi penting agar mempermudah dalam membuat prediksi-prediksi tertentu. Suatu strategi harus memperhatikan fenomena yang terjadi untuk menuju tujuan yang diinginkan dan untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap apa yang telah di capai. Suatu strategi yang optimal tentunya memberikan manfaat yang baik bagi suatu organisasi. Manfaat strategi yaitu untuk mengidentifikasi rincian informasi , mengefektifkan langkah-langkah yang diputuskan, menentukan skala prioritas yang akan di upayakan serta mempermudah koordinasi secara internal dalam suatu organisasi agar tidak menimbulkan konflik (Siagian,2002:200)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam tulisan ini, dalam proses penataan ruang PKL di Kota Bandung, Dinas Tata ruang berusaha untuk lebih memahami kompleksitas di lingkungan PKL sehingga dinas Tata Ruang bekerja sama dengan Kewilayahan dalam proses perencanaan penataan ruang di Kota Bandung. Dimana kewilayahan akan mengkoordinir para PKL yang akan di relokasi di tiap-tiap kewilayahan yang mereka pimpin karena Kewilayahan dinilai satu tingkat lebih dekat terhadap PKL dibandingkan dinas-dinas lain yang ada di Kota Bandung.

Kegiatan penataan PKL di Kota Bandung memiliki kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar dalam penataannya sehingga diperlukan adanya Strategi penataan PKL. Keberadaan PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang

publik. Hanya saja pemerintah lebih memprioritaskan para PKL yang berkependudukan di Kota Bandung dibandingkan para PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tata Ruang berupaya melakukan penataan dengan mendesain dan membangun lokasi yang baru sesuai dengan luas dan kapasitas yang tersedia.

Dinas Tata Ruang berusaha menata relokasi PKL menjadi relokasi yang nyaman dan strategis bagi para PKL. Dinas Tata Ruang tidak ingin mendesain relokasi PKL berdasarkan jumlah PKL melainkan berdasarkan kapasitas luas wilayah yang akan di relokasi, sehingga dalam proses penataan ini diperlukan hasil data PKL yang berasal dari Bappelitbang untuk menentukan PKL mana yang layak untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini berupaya untuk mencapai tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL yakni mengurangi jumlah PKL dan meningkatkan taraf hidup para PKL dengan harapan menaikkan kelas PKL satu tingkat dari sebelumnya.

### **3) Bidang Pembinaan yang Diurus Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung**

Pembinaan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan Penatan PKL. Pembinaan merupakan suatu proses penggunaan manusia, alat, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya. Seperti yang dikatakan oleh Salusu (2008) bahwa strategi yang efektif



hendaknya memfokuskan dan menyatukan seluruh sumber daya yang berada dalam unit kerja maupun yang ada dalam organisasi. Manfaat dari adanya pembinaan adalah untuk meningkatkan kemampuan, tanggungjawab, dan kesungguhan dalam bekerja melalui proses pendidikan dan pelatihan. Sehingga dalam strategi penataan PKL di Kota Bandung, Pemerintah tidak hanya melakukan usaha penataan dan penertiban PKL namun juga berusaha untuk melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan sumberdaya yang ada dalam sektor informal (PKL).

Menurut (Djumara, 2009:15) bahwa pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggungjawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan Pembinaan terhadap masyarakat ataupun PKL merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui jasa untuk memenuhi kebutuhan para PKL. Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk melakukan upaya penataan, penertiban, dan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kota, dan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat maupun PKL yang ada di Kota Bandung, serta untuk membantu para PKL dalam melaksanakan ketertiban-ketertiban melalui Perda penataan PKL yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Robert dalam (Bagus Purnama, 2015:28) bahwa Pelayanan Publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa baik

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.

Pemerintah Kota Bandung dan Dinas UMKM Kota Bandung berusaha untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para PKL yang akan dibina. Komunikasi merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan pembinaan, tanpa adanya komunikasi maka proses pembinaan terhadap para PKL tidak akan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan komunikasi seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam berhadapan dengan bermacam-macam orang yang berbeda watak maupun latar belakang guna mencapai kehidupan organisasi dan tujuan organisasi. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah karena salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi.

Fungsi seorang pemimpin bukan hanya berperan sebagai pengambil keputusan melainkan sebagai fungsi instruktur atau komunikator seperti yang dikemukakan oleh Rivai dan Mulyadi (2009:34) dimana pemimpin dapat menentukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada bawahannya untuk dikerjakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi para bawahannya agar mau melakukan apa yang diperintahkan. Fungsi instruktif tidak selalu

diterapkan secara otoriter, apabila dilakukan dengan cara otoriter maka akan menghilangkan kewibawaan seorang pemimpin tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam tulisan ini, bahwa Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mengelola Pedagang Kaki Lima dengan cara yang humanis dengan melakukan komunikasi efektif antara pemimpin dan bawahannya dengan menerapkan pendekatan *Win-win Solution* dimana Pemerintah Kota Bandung menghimbau kepada Satgasus Penataan PKL untuk menata dan membina PKL dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi dari PKL itu sendiri sehingga tidak ada kerugian di sebelah pihak. Seperti halnya yang ditulis oleh Sukarna (1990:44) bahwa kepemimpinan demokratik merupakan gaya kepemimpinan yang merakyat dan menganggap bahwa semua orang yang berada disekelilingnya mempunyai kesamaan kebutuhan dasar hidup, kesamaan tujuan dan sebagainya.

Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab pembinaan PKL terhadap Dinas UMKM Kota Bandung. Gaya kepemimpinan demokratik yang dimaksud dalam penerapan strategi pembinaan PKL ini yaitu Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas UMKM harus mampu mewujudkan kebutuhan masyarakatnya dengan berusaha menciptakan program-program baru dan belum pernah ada dalam pemerintahan tersebut. Gaya kepemimpinan yang demokratik harus melakukan pendekatan kepemimpinan yang bersifat inovatif dimana pemimpin dapat mewujudkan, memperbaharui dan mengubah dengan cepat hal-hal yang dianggap kurang menguntungkan terhadap

kehidupan masyarakatnya seperti yang dituliskan oleh Sukarna (1990:44) dalam bukunya yang berjudul “ Kepemimpinan dalam Administrasi”.

Pada tahun 2017 dinas UMKM Kota Bandung telah memberikan dan melaksanakan beberapa program yang inovatif dalam pelaksanaan penataan PKL seperti yang telah ditetapkan dalam Perwal No 888 Tahun 2012 yaitu :

- a. Bimbingan Teknis (Bintek) kepada para PKL dengan membimbing para PKL untuk membentuk koperasi atau mengajarkan para PKL untuk berjualan dengan media online agar PKL menjadi lebih sejahtera lagi dan dapat melihat peluang yang lebih besar dari yang sebelumnya.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dengan melakukan temu usaha antara PKL dengan lembaga keuangan serta memfasilitasi Program magang dan program studi komparatif seperti bekerja sama dengan bank BJB untuk melakukan peminjaman modal dengan bunga 0% dan bekerja sama dengan beberapa BUMN dengan membentuk KCR (Kredit Cinta rakyat) untuk memperoleh sponsordana dalam penataan PKL dan program PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha PKL.
- c. Pembinaan terhadap PKL terkait bantuan bimbingan manajemen keuangan.

- d. Melakukan kegiatan promosi hasil dagang para PKL dengan mengikutsertakan para PKL dalam beberapa acara maupun pameran yang berada di Kota Bandung.

Dari hasil wawancara terhadap Dinas KUMKM dan wawancara terhadap beberapa PKL yang berada di Kota Bandung, penulis dapat menyimpulkan bahwa Inovasi-inovasi yang telah ditetapkan oleh Perwal No 888 tahun 2012 telah terlaksana dengan baik terhadap PKL di tiap-tiap kewilayahan. Banyak PKL yang telah merasakan manfaat dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM.

#### **4) Bidang Pengawasan yang Diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

Pengawasan merupakan salah satu tahapan dalam serangkaian proses manajemen strategi. (Nawawi, 2005:46) menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam suatu strategi harus selalu dilaksanakan dalam suatu organisasi. Pengawasan diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) atau menilai (*evaluating*) tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efesiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setelah aspek pengambilan keputusan dan komunikasi, dalam menunjang kinerja tentunya tidak lepas dari peran pemimpin yang ditunjukkan dengan gaya kepemimpinan dalam mengawasi pegawai. Setiap organisasi tentunya mengkehendaki segala tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Untuk itu, harus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Seorang pemimpin dapat juga dikatakan sebagai seorang manajer dalam suatu organisasi dimana fungsi dari manajer menurut George R. Terry dalam Buku Moekijat (1984) yakni Merencanakan (planning), Mengorganisasikan (Organizing), Menggerakkan (actuating), dan Mengawasi (controlling). Satuan Pamong Praja (Satpol PP) merupakan suatu lembaga yang memegang kekuasaan dalam fungsi pengawasan, pengendalian, dan penertiban PKL di dalam Satgasus Penataan PKL Kota Bandung.

Dalam proses penataan PKL ini, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan penataan mulai dari pendataan, perencanaan, penerapan pelaksanaan zonanisasi hingga pada tahap pembinaan dan pembimbingan PKL. Akan tetapi, apabila masih ada PKL yang melanggar peraturan penataan PKL yang telah ditetapkan maka disinilah Satpol PP bekerja untuk melakukan pengawasan untuk mengukur dan menilai sejauh mana efektivitas kinerja dari para PKL dalam menaati Peraturan Penataan PKL yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga dalam hal ini, Satpol PP Kota Berusaha untuk melakukan pengawasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perwal Bandung no 888 Tahun 2012 bahwa pengawasan yang hendaknya dilakukan oleh satpo PP dalam penataan PKL yakni:

- a. Melakukan pengawasan pada zona merah secara rutin 2-3 kali sehari,
- b. Melakukan pengawasan zona kuning paling sedikit 1 kali dalam satu minggu, dan



- c. Melakukan pengawasan pada zona hiau paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

Selain berperan sebagai badan pengawasan dalam penataan PKL, Satpol PP juga berperan sebagai pengendalian dan penegakan hukum. Dimana apabila dalam proses pengawasannya masih ada beberapa PKL yang melanggar, maka Satpol PP akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 hari. Apabila PKL tersebut masih melanggar, maka Satpol PP akan mencabut Tanda Pengenal Pedagang dan melarang PKL tersebut untuk melakukan aktivitas berdagang di Kota Bandung. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Satpol PP yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif tanpa adanya tindak kekerasan. Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Satpol PP berusaha memperngaruhi para PKL dengan mengubah kepercayaan, tingkah laku dan pemikiran para PKL untuk ikut berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan oleh Sukarna (1990;44) bahwa gaya kepemimpinan yang demokratik akan menggunakan salah satu pendekatan yakni pendekatan kepemimpinan persuasif.

Kepemimpinan tipe demokratik akan membimbing bawahannya untuk mau mengikuti segala yang ia kehendaki. Kartono (2002 :53) mengemukakan bahwa seorang pemimpin yang baik akan menggunakan salah satu metode kepemimpinan demokratik yakni memberi celaan dan pujian. Pemerintah Kota Bandung bersama Satpol PP memberikan celaan berupa teguran dan peringatan terhadap para PKL yang masih melanggar. Celaan ini diberikan dengan maksud agar para PKL yang membuat

kesalahan menyadari kekeliruannya dan bersedia memperbaiki perilakunya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam tulisan ini, Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penataan PKL di Kota Bandung yakni dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan Walikota secara langsung yaitu dengan cara ikut serta mengawasi dan melihat lihat keadaan PKL dan terkadang turun langsung kelapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemimpin Kota Bandung dapat dikatakan berjalan secara proaktif dimana pemimpin mau turun langsung dan menegur secara langsung para PKL yang melanggar, bahkan terkadang Pemimpin Kota Bandung datang ke tempat relokasi PKL untuk melihat-lihat dan memberli barang dagangan dari para PKL tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP yang bertugas sebagai bidang pengawasan dan penegak hukum dalam proses penataan PKL di Kota Bandung.

Dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap PKL. Dari hasil wawancara Satpol PP selalu melakukan pengawasan paling sedikit 3 kali sehari atau lebih di 3 zona PKL dengan waktu yang tidak menentu. Dalam hal ini Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan dengan lebih ketat, dimana yang telah di tuliskan dalam Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012 bahwa tugas bidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan hanya 2 kali sehari di Zona merah, 1 kali seminggu di zona

kuning dan 1 kali dalam 3 bulan di zona hijau dengan waktu tidak menentu.

Dinas Satpol PP berusaha melaksanakan pengawasan lebih dari yang ditentukan oleh Perwal Kota Bandung No 888 Tahun 2012, Hal ini bertujuan agar para PKL lebih tertata rapi dan lebih tertib lagi. Namun dalam proses penelitian yang dilakukan penulis terkait bidang pengawasan di salah satu zona PKL Kota Bandung masih ada beberapa PKL yang beraktivitas di zona merah, namun diyakini bahwa para PKL yang melanggar tersebut paling banyak masyarakat yang bukan penduduk Kota Bandung. Satpol PP tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengendalian dan penegakan hukum karena mereka selalu melakukan peringatan dengan cara tertulis agar proses pengawasan dan penertiban ini lebih bersifat humanis.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penataan PKL di Kota Bandung**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL**

Kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur dalam Pemerintahan Daerah Kota Bandung memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kinerja Pemerintah didalam

mengatasi permasalahan penataan PKL di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pemerintahannya untuk mencapai sasaran strategi penataan PKL yang ingin di capai di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menggunakan beberapa dinas untuk ikut ambil bagian dalam Penataan PKL di Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi di tiap-tiap dinas tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Salusu (2008:101) bahwa strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan ataupun sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan cara menggunakan hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Berdasarkan hasil dan observasi yang dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan strategi penataan PKL dengan menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki untuk melakukan tahap-tahap penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang di urus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang di urus oleh Satpol PP. Pemerintah Kota Bandung juga tidak hanya memanfaatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya yang ada di dalam Aparatur Pemerintahan, namun juga memanfaatkan koordinator PKL yang berada didalam forum PKL untuk

mempermudah proses pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung.

## 2) Program Kemitraan

Kemitraan yang dibangun dengan beberapa sektor baik itu sektor pemerintah, swasta maupun Usaha Kecil Menengah akan memberikan kemudahan dan mendukung terlaksananya penataan pkl yang terarah dan tepat sasaran. Strategi penataan PKL yang dimulai dari tahap perencanaan, penataan, pembinaan dan pengawasan merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakat sebagai tanggungjawabnya terhadap publik maupun melalui kemitraan bersama swasta dan masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Djumara, (2009:15) bahwa pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada publik baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa dalam mendukung keberhasilan strategi penataan PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menjalin kemitraan dengan beberapa sektor pemerintahan seperti dinas Bappelitbang, dinas UMKM, dinas Tata Ruang, dan dinas Satpol PP selaku anggota Satgasus yang bertugas menyelesaikan permasalahan PKL sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Kota Bandung juga bekerja sama

dengan sektor swasta seperti Bank BJB, Lee Mineral, Teh Botol Sosro dan lain-lain untuk membantu dan memfasilitasi PKL yang berada di daerah Kota Bandung. Tujuan dari penerapan program kemitraan ini adalah untuk lebih memajukan tingkat kehidupan para PKL, meningkatkan pendapatan PKL sendiri, menciptakan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan pengembangan ekonomi lokal.

**b. Faktor Penghambat**

**1) Anggaran Yang Terbatas Untuk Memfasilitasi Sarana dan Prasarana**

Realisasi dari pelaksanaan strategi penataan PKL yang dilaksanakan oleh Satgasus penataan PKL untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bersih dan rapih sangat berhubungan dengan anggaran yang telah disediakan oleh Kota Bandung untuk pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran sangat diperlukan untuk melaksanakan strategi penataan PKL khususnya dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana seperti penyediaan lokasi baru untuk para PKL yang memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya penganggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2005:46) yang menjelaskan bahwa salah satu proses yang paling penting dalam strategi manajemen yaitu penganggaran, karena penganggaran berfungsi sebagai



pertanggungjawaban dan penggunaan dana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa anggaran yang dimaksud diperlukan untuk mendukung pelaksanaan strategi penataan PKL dalam memberikan fasilitas layanan dan infrastruktur seperti penataan dan penyediaan lokasi serta pelaksanaan pembinaan maupun pengelolaan agar dapat mengembangkan usaha sektor informal utamanya adalah para PKL yang berada di Kota Bandung. Satgasus penataan PKL menilai bahwa alokasi dana yang dianggarkan untuk menjalankan strategi penataan PKL tidak terlalu besar. Dimana hal ini secara tidak langsung menjadikan keterbatasan dalam menerapkan program-program pemberdayaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal yang paling dominan yang menjadi hambatan adalah anggaran yang tidak memadai untuk menyediakan dan menata lokasi baru bagi para PKL. Akibatnya penataan PKL di beberapa Kota Bandung ditempatkan dan ditertibkan di sebagian tanah milik swasta dengan memiliki beberapa perjanjian dan kerjasama. Dengan demikian masalah terbatasnya anggaran dana yang dialokasi dapat menghambat keberhasilan pencapaian tujuan dari strategi penataan PKL yang berada di Kota Bandung.

## **2) Banyaknya PKL Yang Berasal Dari Luar Kota Bandung**

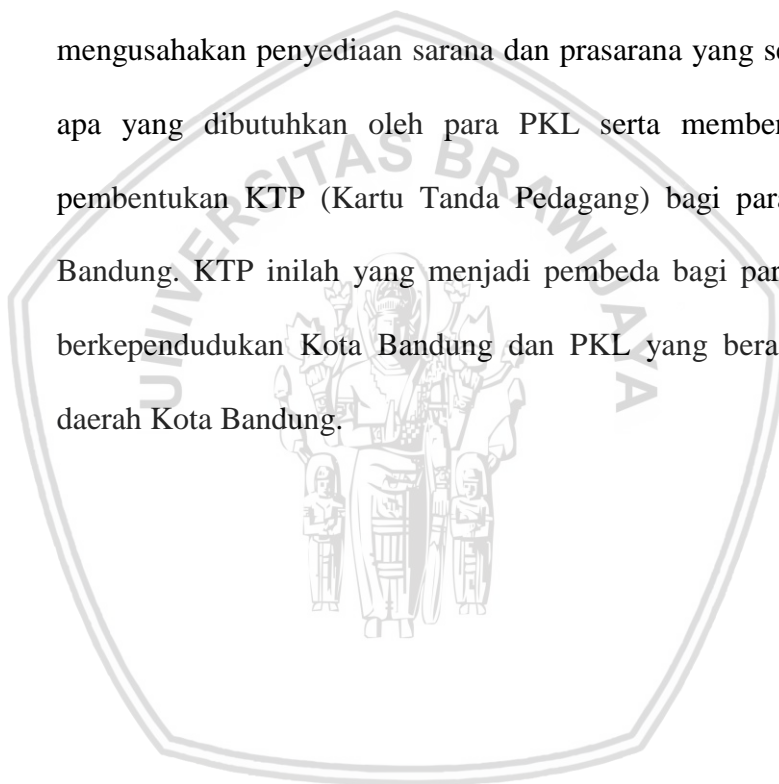
Permasalahan keberadaan PKL yang menjadi penghambat dalam proses penataan PKL bukan hanya tentang anggaran yang

terbatas, namun jumlah PKL yang semakin meningkat juga menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat mempengaruhi keberhasilan strategi penataan PKL di Pemerintahan Daerah. Siagian (2001:142) yang dikutip oleh Wida Aristanti (2016) menuliskan bahwa Pemerintah daerah berperan sebagai Stabilisator ekonomi, dimana pemerintah harus dapat menjamin kondisi terpeliharanya pertumbuhan ekonomi setiap masyarakat yang ada di dalam pemerintahannya termasuk kesempatan usaha yang dimiliki oleh masyarakatnya. Namun pada kenyataan yang ada dilapangan, tidak semua masyarakat yang hidup dalam daerah tersebut dapat dijamin hak usahanya.

Pertentangan kepentingan antara keindahan dan ketertiban kota terhadap pertahanan dan kebutuhan hidup para PKL tidak akan kunjung usai dan akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga membuat banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang kompetitif seperti halnya masyarakat desa yang berbondong-bondong datang ke kota dan tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga usaha yang dapat dilakukan adalah sebagai seorang PKL.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah berusaha untuk membuat strategi kebijakan tentang penataan PKL di Kota Bandung. Namun yang menjadi salah satu penghambat dalam strategi penataan

PKL di Kota Bandung adalah banyaknya jumlah PKL yang berasal dari luar Daerah Kota Bandung. Seperti yang diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Dinas bappelitbang bahwa jumlah keberadaan PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung hampir 50% dari PKL penduduk Kota Bandung itu sendiri. Dalam pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan Satgasus Penataan PKL Kota Bandung tetap mengusahakan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para PKL serta membentuk inovasi pembentukan KTP (Kartu Tanda Pedagang) bagi para PKL Kota Bandung. KTP inilah yang menjadi pembeda bagi para PKL yang berkependudukan Kota Bandung dan PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berisikan penyajian data fokus dan pembahasan data fokus, maka peneliti menyimpulkan:

1. Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Melalui Gaya Kepemimpinan Demokratrik

Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL di Kota Bandung yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penataan PKL (Satgasusu PKL) berdasarkan Perda no 04 Tahun 2011 yang terdiri dari beberapa SKPD untuk bekerjasama membantu Walikota dalam mengatasi permasalahan PKL yang terjadi di Kota Bandung. Pelaksanaan penerapan strategi penataan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara adanya pendekatan kepemimpinan yang demokratis, Pemerintah Kota Bandung memberikan motivasi, kebebasan dan kepercayaan yang cukup kepada anggota Satgasus dan para PKL untuk ikut berusaha dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Sukarna (1990:44) bahwa salah satu pendekatan yang digunakan dalam kepemimpinan demokratis merupakan pendekatan kepemimpinan yang motivatif.

Strategi penataan PKL yang dilaksanakan di Kota Bandung yaitu dengan membentuk Satgasus PKL dan memberikan tugas dan fungsi kepada beberapa dinas di Pemerintahan Kota Bandung yakni:

- 1) Perencanaan dan Pendataan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)

Bappelitbang merupakan bidang perencanaan penataan PKL yang bertugas mengumpulkan data terkait PKL, menyusun rencana penataan dan pembinaan PKL, dan melakukan pengambilan keputusan yang lebih rinci dalam rencana penempatan PKL pada zona kuning dan hijau bagi PKL. Pemerintah Kota Bandung berusaha melakukan perencanaan penataan PKL dengan melakukan gaya kepemimpinan yang demokratik seperti yang dituliskan Sukarna (1990:44) bahwa pemimpin yang demokratik akan menggunakan pendekatan kepemimpinan partisipatif. Setiap perencanaan penataan PKL didasari oleh masukan –masukan yang berasal dari Satgasus maupun PKL itu sendiri.

- 2) Penataan yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang

Kegiatan penataan PKL di Kota Bandung memiliki kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Tata Ruang, dimana permasalahan utama dalam penataan PKL adalah jumlah mereka yang semakin banyak baik dari masyarakat Kota Bandung sendiri maupun masyarakat yang berasal dari luar daerah Kota Bandung. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan para PKL yang berkependudukan di Kota Bandung dan yang memiliki Kartu Tanda Pedagang yang di diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Bappelitbang.

- 3) Bidang Pembinaan yang diurus oleh Koperasi dan UKM Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk melakukan Penataan PKL dengan cara yang humanis dan inovatif seperti salah satu pendekatan kepemimpinan demokratik yang disampaikan Sukarna (1990:44) yakni pendekatan epemimpinan yang inovatif . Pemerintah Kota Bandung melakukan penataan PKL pemelalui pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Dinas UMKM Kota Bnadung. Pada tahun 2017 Dinas UMKM Kota Bandung melaksanakan beberapa inovasi pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan penataan PKL sesuai yang telah ditetapkan dalam Perwal No 888 Tahun 2012 yakni pengadaan kegiatan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, pelaksanaan bimbingan manajemen keuangan bagi para PKL yang di telah ditata, dan kegiatan promosi lokasi PKL sebagai lokasi wisata belanja.

- 4) Bidang Pengawasan yang diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Satpol PP merupakan Bidang Pengawasan dalam Satgasus Penataan PKL yang memegang kekuasaan dalam fungsi pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Satpol PP berusaha melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perwal Bandung No 888 Tahun 2012 dan apabila ada pelanggaran dari para PKL, maka Satpol PP akan



memberikan peringatan tertulis sebelum melakukan penegakan hukum dalam pelaksanaan penataan PKL. Pemerintah Daerah Kota Bandung bersama Satpol PP berusaha melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan melakukan pendekatan persuasif. Sama halnya seperti yang disampaikan Sukarna (1990:44) yakni kepemimpinan yang demokratik akan melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan persuasif.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penataan PKL di Kota Bandung

### a. Faktor Pendukung

#### 1) Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas Dalam Melaksanakan Tahap-Tahap Penataan PKL

Kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur dalam Pemerintahan Daerah Kota Bandung menjadi faktor pendukung dalam mengatasi permasalahan penataan PKL di Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan strategi penataan PKL dengan menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki untuk melakukan tahap-tahap penataan PKL mulai dari perencanaan yang diurus oleh Bappelitbang, Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang, Pembinaan yang diurus oleh Dinas UMKM dan Pengawasan yang diurus oleh Satpol PP

#### 2) Program Kemitraan

Faktor pendukung keberhasilan strategi penataan PKL di Kota Bandung adalah program kemitraan yang dilakukan dengan beberapa

sektor pemerintahan seperti dinas Bappelitbang, dinas UMKM, dinas Tata Ruang, dan dinas Satpol PP selaku anggota Satgasus yang bertugas menyelesaikan permasalahan PKL sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Kota Bandung juga bekerja sama dengan sektor swasta seperti Bank BJB, Lee Mineral, Teh Botol Sosro dan lain-lain untuk membantu dan memfasilitasi PKL yang berada di daerah Kota Bandung.

b. Faktor Penghambat

1) Anggaran Yang Terbatas Untuk Memfasilitasi Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor penghambat penataan PKL di Kota Bandung adalah anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur penataan PKL serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL.

2) Banyaknya PKL Yang Berasal Dari Luar Kota Bandung

Faktor penghambat lain dalam strategi penataan PKL di Kota Bandung adalah banyaknya jumlah PKL yang berasal dari luar Daerah Kota Bandung. Seperti yang diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Dinas bappelitbang bahwa jumlah keberadaan PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung hampir 50% dari PKL penduduk Kota Bandung itu sendiri.

**B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara aktif terhadap keseluruhan para PKL dan tidak hanya beberapa koordinator PKL saja, agar pemberian

informasi terkait perencanaan penataan PKL di Kota Bandung lebih akurat dan pelaksanaannya pun lebih efektif dan efisien. Sehingga para PKL tidak ragu untuk di tata dan ditertibkan.

2. Hendaknya Pemerintah Kota Bandung tidak mudah puas dengan keberhasilan yang telah dicapai, sebaiknya selalu mengadakan monitoring secara rutin terhadap pedagang agar ketertiban PKL tetap terjaga.
3. Perlunya pengembangan program kemitraan dengan beberapa sektor swasta di Kota Bandung untuk dapat mendukung dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana seperti lokasi yang strategis, penyediaan dana dan infrastruktur lainnya bagi penataan PKL di Kota Bandung agar lebih tertib dan baik.
4. Apabila masih ada petualang PKL yang berasal dari luar daerah Kota Bandung dan melanggar peraturan dengan berdagang di zona merah, sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tetap memberi pembinaan dan peringatan secara rutin dan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, Wida. 2016. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Stroberi (Studi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jumlah Penduduk Miskin, *Presentasi Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2017*. (Diakses Melalui [bps.go.id/](http://bps.go.id/) pada 21-12-2017)
- Dermawan, Ariy. 2015. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Adat Istiadat Dan Budaya Tana Samawa (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa)*. Malang. Universita Brawijaya.
- Djumara, Noorsyamsa. 2009. *Standar Pelayanan Publik (Langkah-Langkah Penyusunan)*. Jakarta: LAN Pusat Kajian Manajemen Pelayanan.
- Kemenpan No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.
- Karjadi.M. 1983. *Kepemimpinan(Leadership)*. Bogor: PT. Karya Nujantara.
- Moekijat. 1984. *Prinsip-Prinsip Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: Penerbit alumni.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rossakarya.

Nawawi, Hadari, 2005, *Manajemen strategik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nurbany. 2016. “Jumlah PKL di Bandung Meningkat 10 Persen”,  
<http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/ob3omjPb-jumlah-pkl-di-bandung-meningkat-10-persen> (Diakses Melalui bps.go.id/ pada 21-12-2017)

PERWAL Kota Bandung No.888 Tahun 2012

Purwanda, Angga. 2017. “Sejumlah Pkl Jadi Korban Kekerasan Satpol PP Cianjur”<http://www.beritacianjur.com/read/10275/sejumlah-pkl-jadi-korban-kekerasan-satpol-pp-cianjur> (Diakses Melalui bps.go.id/ pada 23-12-2017)

Prajasari, Fahlevi. 2012. *Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Melalui Kepemimpinan Persuasif Studi Pada Pemerintah Kota Solo*. Malang. Universitas Brawijaya.

Purnama, Bagus. 2015. *Inovasi Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek)*.Malang. Universitas Brawijaya.

Rivai, Vaithzal & Deddy Mulyadi.2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Tiga*. Jakarta: Rajawali Press

Sabaruddin, Abdul. 2014. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik(Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Kolaka: Graha Ilmu.

Salusu, J . 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik:Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.

Siagian,S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soewardi, Eddy. 1980. *Aspek- Aspek Kepemimpinan dalam Manajemen Operasional*. Bandung.

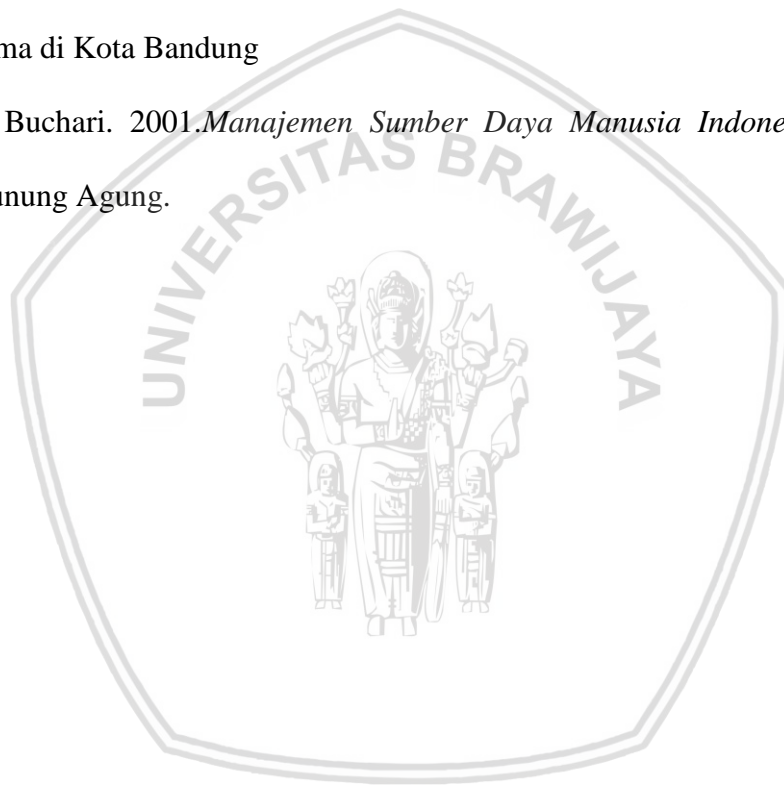
Sunundhia. Widiyanti. 1993. *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.

Sukarna. 1990. *Kepemimpinan Dalam Administrasi*. Bandung: Mandar Maju.

PERDA No 04 Tahun 2011 Tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Zainun, Buchari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.





## PEDOMAN WAWANCARA

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL DI Kota Bandung?
2. Apa saja peraturan-peraturan yang mendasari dan mendukung dari strategi penataan PKL di Kota Bandung?
3. Apa yang dimaksud dengan Satgasus penataan PKL di Kota Bandung?
4. Bagaimana latar belakang dibentuknya Satgasus Penataan PKL Kota Bandung?
5. Apa saja tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL di Kota Bandung?

### Strategi Penataan PKL

1. Bagaimana tugas dan fungsi dinas-dinas yang berada di dalam Satgasus penataan PKL Kota Bandung?
2. Bagaimana proses penataan dan penempatan relokasi PKL di Kota bandung?
3. Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dalam proses penataan PKL di Kota Bandung?
4. Apakah proses penataan dan relokasi PKL yang dilakukan sudah mempertimbangkan kebutuhan dari PKL?
5. Apakah ada bentuk inovasi-inovasi yang diberikan Pemerintah Kota Bandung dalam proses penataan dan penertiban PKL?

### **Kepemimpinan**

1. Bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam proses penataan PKL di Kota Bandung?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Walikota Bandung ?
3. Bagaimana bentuk komunikasi Walikota Bandung terhadap PKL?
4. Apasaja bentuk pengawasan Pemerintah Kota Bandung dalam proses penataan ini?
5. Apakah ada bentuk motivasi yang diberikan oleh Walikota untuk meningkatkan partisipasi PKL dalam proses penataan ini?

### **PENDUKUNG**

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL?

### **PENGHAMBAT**

3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung?
4. Masalah-masalah apasaja yang dihadapi oleh satgasus penataan PKL dalam melakukan penataan dan penertiban PKL di Kota Bandung?
5. Bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut?

## LAMPIRAN



Wawancara bersama salah satu PKL di basement alun-alun Kota Bandung



Wawancara bersama salah satu PKL di pasar Balonggede



### contoh penataan PKL Kota Bandung



**Pintu masuk Basement alun-alun Kota Bandung yang menjadi zona hijau bagi para PKL**



**Hasil relokasi dari alun-alun Kota Bandung ke basement alun-alun Kota Bandung**



**Hasil penataan ulang pasar Balonggede Kota Bandung**